

STAR

Study & Accounting Research

Jurnal Akuntansi & Bisnis

ISSN 1693-4482
Vol XIII, No. 2 - 2016

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

• **Susilawati & Lukman Hakim**

Perancangan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Menunjang Kualitas Laporan Keuangan pada Mi Miftahul Falah

• **Aceng Kurniawan & Siska nur Apriliani**

Pengaruh Cash Ratio dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas (Survey pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional)

• **Tuti Herawati & Kin-Kin Kania**

Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

• **Meilani Purwanti & Surini**

Pengaruh Audit Fee dan Client Size Terhadap Audit Delay dan Implikasinya Terhadap Kualitas Audit

• **Siti Kustinah & Evi Lestari**

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011 - 2012)

• **Ageng Saepudin Kanda, Dian Anita & Dini Astrilia Rachman**



LPPM
(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
STIE STEMBI
Bandung Business School

www.stiestembi.ac.id

STAR

Study & Accounting Research Jurnal Akuntansi & Bisnis

Diterbitkan oleh :

LPPM STIE STEMBI – Bandung Business School

Penanggung Jawab :

Ketua STIE STEMBI – Bandung Business School

Pemimpin Umum :

Dr. Ir. HM. Budi Djatmiko, SE., M.Si., M.EI

Dewan Redaksi :

Dr. Patria Supriyoso, SE., M.Si; Dr. Ir. Yopines Ansen, SE., M.Si., S.Sos., S.Kom;
Dr. Ir. Eka Purwanda, SE., M.Si; Dr. Supriyadi, SE., M.Si;
Dr. Siti Kustinah, SE., M.Si; Tuti Herawati, SE., M.Si
Susilawati, SE., M.Si ; Meilani Purwanti, SE., M.Si

Sekretaris Redaksi :

Dr. Supriyadi, SE., M.Si

Bendahara :

Meilani Purwanti, SE., M.Si

Desain/Layout :

Lukman

Sirkulasi :

Aceng Kurniawan, SE

Alamat Redaksi :

LPPM STIE STEMBI - Bandung Business School
Gedung STIE STEMBI Lt VI
Jl. Buah batu No 26 Bandung 40262
Telp (022-7307722) Fax : (022-7307967)
Email : redaksistar.stembi@gmail.com

STAR diterbitkan pertama kali tahun 2003 dengan frekwensi terbitan 3 kali dalam setahun (4 bulanan). STAR merupakan media informasi karya ilmiah tentang Ilmu Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis bagi para peneliti, dosen, mahasiswa dan praktisi khususnya bagi civitas akademika STIE STEMBI – Bandung Business School dan umumnya bagi masyarakat.

Redaksi menerima sumbangan naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain dengan cara dikirim ke alamat redaksi atau melalui email dalam bentuk soft-file. Redaksi berhak untuk meringkas dan atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi tulisan. Pendapat yang tercantum pada artikel jurnal ini adalah pendapat penulis, dan bukan pendapat redaksi.

EDITORIAL

Sidang pembaca yang terhormat,

Atas perkenan Allah SWT, Jurnal STAR – Study & Accounting Research Volume XIII, No. 2 – 2016 dapat kami terbitkan. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan edisi ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kontributor penulis yang telah mengirimkan hasil karyanya. Semoga artikel yang disajikan memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi pembangunan bangsa maupun bagi pengembangan ilmu.

Dewan redaksi mengundang sidang pembaca dari berbagai pihak, baik dosen, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi untuk berpartisipasi mengisinya melalui tulisan baik berupa karangan, ringkasan hasil penelitian, maupun resensi yang sesuai dengan tujuan dan misi dari jurnal ini.

Bandung, Juli 2016

REDAKSI

DAFTAR ISI

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah • Susilawati & Lukman Hakim	1 - 13
Perancangan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Menunjang Kualitas Laporan Keuangan pada Mi Miftahul Falah • Aceng Kurniawan & Siska nur Apriliani	14 - 24
Pengaruh Cash Ratio dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas (Survey pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional) • Tuti Herawati & Kin-Kin Kania	25 - 35
Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak • Meilani Purwanti & Surini	36 - 49
Pengaruh Audit Fee dan Client Size Terhadap Audit Delay dan Implikasinya Terhadap Kualitas Audit • Siti Kustinah & Evi Lestari	50 - 57
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011 - 2012) • Ageng Saepudin Kanda, Dian Anita & Dini Astrilia Rachman	58 - 66

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Susilawati

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Lukman Hakim

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Laporan keuangan pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian asosiatif. Jumlah sampel yang diteliti adalah 17 Dinas yang ada di Kabupaten Garut. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Alat analisis yang dipakai adalah analisis path karena ada hubungan antar variabel independen. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (p4(1)). Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian, dalam PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan daerah menyebutkan dalam pasal 2 bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan juga dalam pasal 3 disebutkan bahwa informasi keuangan daerah tersebut harus memenuhi

prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut dituangkan ke dalam laporan keuangan.

Dalam kerangka konseptual SAP disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun laporan keuangan pemerintah tersebut di atas diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas LKPD khususnya bertujuan

untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI. Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada semester I tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintah disajikan dalam tabel dibawah ini.

Menurut data dari IHPS BPK, 2013 terlihat bahwa pada tahun 2012 opini LKPD provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah kabupaten sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.

Informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah memerlukan sistem akuntansi yang memadai. Mardiasmo (2009 : 26) menyatakan bahwa implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu tantangan karena lingkungan sektor publik yang sangat kompleks membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan.

PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/ bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009 : 143). Penerapan sistem akuntansi pemerintah menuntut adanya pemahaman yang utuh dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan (tim pokja evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan daerah (KMK 355/KMK.07/2001). Mardiasmo (2009 : 20) mengatakan untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu: (1) Reformasi sistem anggaran (*budgeting reform*), (2) Reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*) (3) Reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*), (4) Reformasi sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management reform*). Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public Money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*)

Salah satu kriteria pemberian opini

adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui, sepanjang semester I-2013 hasil pemeriksaan BPK tercatat sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dalam hal ini BPK memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksa dengan tujuan tertentu (PDTT). Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan, dari total 13.969 kasus tersebut senilai Rp56,98 triliun. Sedangkan dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sementara itu, sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 779 kasus senilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. "Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang

ke kas negara, daerah, perusahaan senilai Rp 372,40 miliar". (**Hadi Poernomo 2013**).

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas 21 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk Tahun Anggaran (TA) 2012, meliputi delapan entitas yaitu Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bogor. Terhadap LKPD Kota Depok, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan terhadap 7 LKPD lainnya, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (**BPK 2013**).

Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi masalah berdasarkan pemaparan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Husein (2002:210) menyebutkan bahwa: "*Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan.*"

Hall (2011:5) mendefinisikan sistem sebagai berikut: "*a system is a group of to or more interrelated components or subsystem that serve a common purpose*".

Menurut **Widyanto 2001** dalam (**Mardi 2011:4**), Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransfor-

masikan data keuangan menjadi informasi keuangan, sedangkan menurut **Romney (2005)**, Sistem Informasi Akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi keuangan, dan (2) informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Arif dkk (2002:3) menyebutkan tentang pengertian akuntansi pemerintah:

"Pengertian akuntansi pemerintah tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut."

Sistem akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan organisasi pemerintah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Pengertian di atas disepakati oleh **Mardiasmo 2009** dalam **(Halim, 2012 : 322)** yang menjelaskan bahwa ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisisan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas,

serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

Kegiatan akuntansi pada unit kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Keempat kegiatan akuntansi tersebut diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, empat kegiatan akuntansi tersebut dijabarkan dalam empat prosedur akuntansi pemerintah, yaitu (1) prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) prosedur akuntansi selain kas, dan (4) prosedur akuntansi aset **(Halim, 2012 : 331)**.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu: (1) Tingkat Keakuratan (2) Tingkat Kelengkapan (3) Realtime (4) Kesesuaian Pencatatan (5) Tingkat Pengklasifikasian (6) Tepat Waktu.

Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: pengendalian intern (*internal control*) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan laboran keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas serta efisiensi operasi **(Boynton at all, 2002:37)**.

Sedangkan menurut **IAPI 2011** dalam **(Agoes, 2012:100)**, Pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain atas

entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum.

Tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif (**Arrens, 2008:370**) :

1. Realibilitas laporan keuangan. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan yang penting dalam pengendalian internal ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan keuangan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini (**Arrens, 2008 : 376**).

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP No 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (**Yadiati, 2010 : 52**).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan (**Pura, 2013 : 11**).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (**Hery, 2012 : 2**).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam (**Halim, 2012:266**), tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi ketentuan mengenai alokasi sumber daya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010 ada

empat, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas sektor publik, yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Dalam standar ini, IAI-KASP telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan, dan pemeriksaan antar yurisdiksi serta mana yang paling tepat, antar sektor publik dan swasta, serta untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara basis akuntansi dan basis ekonomi. Standar Akuntansi Sektor Publik (SAKP) dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan (*comparable*) bagi semua yurisdiksi (**Bastian, 2010 : 125**).

Pengaruh akuntansi keuangan lebih mendominasi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia karena besarnya tuntutan publik kepada organisasi sektor publik (dalam hal ini adalah pemerintah) untuk lebih transparan dan akuntabel, dan sarana untuk mewujudkan transparansi publik dan akuntabilitas publik adalah dengan laporan keuangan pemerintah (**Halim, 2012 : 25**).

Ratifah dan Ridwan (2012), menyatakan bahwa dalam penelitiannya menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Yuliani dkk (2010), dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa pemaha-

man akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. **Widyaningsih dkk (2011)**, menyebutkan dalam temuan penelitiannya bahwa tingkat keeratan hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti.

Pengaruh Pengendalian Internal (X_2) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Mulyadi 2001 dalam (**Darwanis dan Desi, 2009**) menyatakan bahwa, bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten dalam teknologi informasi dan jujur, serta bertanggung jawab pada bidangnya, maka perusahaan tersebut akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

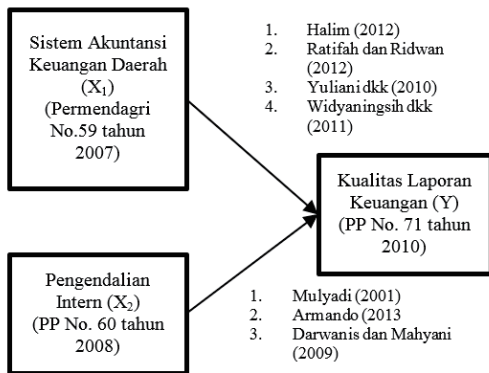
Berikut adalah beberapa hal penelitian terdahulu terkait pengendalian internal.

Armando (2013), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. **Darwanis dan Mahyani (2009)**, Secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Herawati (2014), menyatakan bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keua-

ngan secara simultan; secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan urutan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan model sebagai berikut.



Gambar 1
Model Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H3: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada dasarnya adalah *segala sesuatu yang berbentuk apa saja* yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:95).

Adapun Objek yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas

(independen) yaitu, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), dan Pengendalian Internal (X_2) serta satu variabel terikat (dependen) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:35).

Penelitian ini juga menggunakan metode survey. Menurut Sugiyono (2013 : 81) bahwa penelitian survey merupakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk di generalisasikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2013 : 92) rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2013 : 168) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai negatif, yang berupa kata-kata antara lain: *Sangat Setuju / Selalu / Sangat Positif, Setuju / Sering / Positif, Ragu-ragu / Kadang-kadang / Netral, Tidak Setuju / Hampir Tidak Pernah Negatif, Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah / Sangat Negatif*. Setiap

jawaban responden berturut-turut diberi nilai 5,4,3,2,1 untuk indikasi jawaban positif.

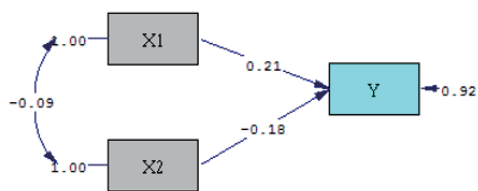
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut **Sugiyono (2013 : 223)**, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (**Sugiono, 2013 : 230**).

Untuk pengujian validitas tiap butir pernyataan digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Selanjutnya nilai korelasi *Product Moment* hasil perhitungan dibandingkan dengan r tabel, jika r hitung lebih besar dari r tabel berarti korelasi *Product Moment* untuk tiap butir pernyataan adalah valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial dibantu dengan menggunakan *LISRELL for Windows* dan *Microsoft Exel 2013*. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2
Analisis Jalur Path
sumber : Data Olahan

Dari gambar di atas, didapatkan persamaan path. Persamaan jalur path tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = \rho X_1 + \rho X_2 + \epsilon$$

Dengan hasil sebagai berikut:

$$Y = 0,21X_1 + -0,18X_2 + \epsilon$$

$$\epsilon = \text{Errorvar} = 0,92, R^2 = 0.08$$

Dari persamaan analisis jalur di atas dapat dilihat bahwa nilai ρY_1 (koefisien jalur X_1) = 0,21; ρY_2 = -0,18. Besarnya pengaruh total X_1 dan X_2 terhadap Y (R^2) ialah sebesar 0,08 (8%). Sedangkan pengaruh variabel lain selain X_1 dan X_2 adalah sebesar 0,92 (92%).

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,21 (21%). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,21 satuan nilai dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Variabel sistem pengendalian internal (X_2) memiliki koefisien jalur sebesar -0,18. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengendalian internal (X_2) satu satuan nilai akan menurunkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -0,18 satuan nilai dengan asumsi variabel lainnya konstan. Berdasarkan dari hasil olahan kuesioner, dapat dilihat bahwa pengendalian internal di Dinas Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial, maka akan dilakukan pengujian dengan uji f dan uji t.

Untuk mengetahui signifikannya tidaknya pengaruh antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara keseluruhan, maka dilakukan uji F dengan uji satu pihak dalam taraf nyata 5% (0,05). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

$$F = \frac{(17-2-1)0,08}{2(1-0,08)}$$

$$F = \frac{1,12}{1,84}$$

$$F = 0,61$$

Keterangan :

- n = jumlah anggota sampel
- k = jumlah variabel independen
- R² = koefisien determinasi

Nilai F_{hitung} di atas kemudian dibandingkan dengan nilai F dari tabel distribusi F Diana diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,74. Nilai F_{hitung} di atas yaitu 0.61 ternyata lebih kecil dibandingkan F_{tabel} (3,74). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima. Dengan kata lain secara simultan berpengaruh tidak signifikan antara variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) dan Pengendalian Internal (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada Dinas Kabupaten Garut.

Tabel 2
Kesimpulan pengujian secara simultan

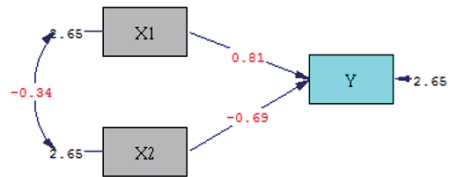
Nilai Fhitung	Nilai Ftabel	Kesimpulan
0,61	3,74	Tidak signifikan

Sumber: Hasil perhitungan

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X₁) dan Pengendalian Internal (X₂) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara Parsial

Untuk mengetahui pengaruh langsung secara individual, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkahnya terlebih dahulu harus dicari t_{hitung} dari masing-masing X₁ dan X₂. Setelah itu, nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan dengan nilai t di tabel. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan nilai t tabel maka hasilnya signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi Dinas Kabupaten

Garut. Sebaliknya apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel} maka tidak signifikan. Artinya, bahwa pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi di dinas Kabupaten Garut. Berikut diagram jalur besarnya nilai thitung melalui software Lisrel 8.8:



Gambar 3
Nilai thitung X₁ dan X₂ terhadap Y
sumber : Data Olahan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

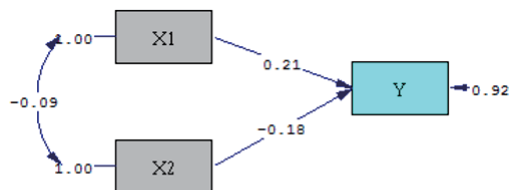
Tabel 3
Kesimpulan pengujian secara individual

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Kesimpulan
X1	0,81	1,761	Tidak signifikan
X2	-0,69	1,761	Tidak signifikan

Sumber: Hasil perhitungan

Dari tabel di atas terlihat bahwa X₁ dan X₂ memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Artinya pengaruh dari X₁ dan X₂ tidak dapat digeneralisir pada seluruh populasi di Dinas Kabupaten Garut.

Dengan path analysis kita dapat mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung setiap variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).



Gambar 4
Pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y
sumber : Data Olahan

Dari gambar di atas dapat dihitung besarnya pengaruh dari masing-masing variabel. Adapun besarnya pengaruh yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh X1

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh langsung} &= p_{yx1} \times p_{yx1} \\ &= 0,21 \times 0,21 \\ &= 0,0441 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh melalui } x_2 &= p_{yx1} \times p_{rx1x2} \times p_{yx2} \\ &= (0,21) \times (-0,09) \times (-0,18) \\ &= 0,0034 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh total} &= 0,0441 + 0,0034 \\ &= 0,0475 \end{aligned}$$

Pengaruh X2

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh langsung} &= p_{yx2} \times p_{yx2} \\ &= (-0,18) \times (-0,18) \\ &= 0,0324 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh melalui } X_1 &= p_{yx2} \times r_{x2x1} \times p_{yx1} \\ &= (-0,18) \times (-0,09) \times (0,21) \\ &= 0,0034 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh total} &= 0,0324 + 0,0034 \\ &= 0,0358 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4
Besarnya pengaruh masing-masing variabel

Variabel	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung		Pengaruh total
		X1	X2	
X1	0,0441		0,0034	0,0475
X2	0,0324	0,0034		0,0352
Pengaruh total				0,0827

Sumber: Hasil perhitungan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh total variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,0475, dan Pengendalian Internal (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

adalah sebesar 0,0872. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas laporan Keuangan (Y) sebesar 4,41% dan secara tidak langsung melalui hubungannya dengan Pengendalian Internal (X₂) sebesar 0,34%.
2. Pengendalian Internal (X₂) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar 3,24% dan secara tidak langsung melalui hubungannya dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) sebesar 0,34%.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua variabel bebas yang diuji yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal yang memiliki pengaruh positif yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan daerah sedangkan Pengendalian Internal berpengaruh negatif tidak signifikan, pengaruh negatif tersebut dikarenakan data yang terkumpul sedikit. Secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, sedangkan Pengendalian Internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Ratifah dan Ridwan (2012)**, menyatakan bahwa dalam penelitiannya menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. **Yuliani dkk (2010)**, dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. **Widyaningsih dkk (2011)**, menyebutkan dalam temuan

penelitiannya bahwa tingkat keeratan hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti.

Kemudian untuk pengaruh pengendalian internal tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Armando (2013)** yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. **Darwanis dan Mahyani (2009)**, Secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. **Herawati (2014)**, menyatakan bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Sistem akuntansi keuangan yang berjalan efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, karena laporan keuangan tersebut telah terstandar dengan baik.

Banyak teori yang telah menyebutkan bahwa efektivitas pengendalian internal membuat sebuah laporan keuangan berkualitas. Walaupun dalam penelitian ini hasilnya berlawanan dengan berbagai teori yang ada dan berbagai hasil penelitian terdahulu, tetapi untuk meningkatkan keterandalan sebuah

laporan keuangan salah satunya ialah dengan pengendalian internal yang berjalan dengan efektif. Pengendalian internal yang efektif membuat sebuah instansi dapat berjalan dengan baik, mencegah terjadinya berbagai pelanggaran, patuh terhadap peraturan yang ada dan laporan keuangan yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pemerintahan, seluruh komponen instansi yang terdapat di dalamnya haruslah menjalankan pengendalian internal dengan efektif, dengan begitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya mempunyai kriteria di antaranya: andal, dapat dipahami, relevan dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang penerapan standar akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terlihat bahwa penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tetapi pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut saran yang diusulkan: Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebaiknya lebih memperlihatkan pengendalian internal dengan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan agar tidak lagi terdapat

salah saji dalam laporan keuangan. SDM yang kompeten dibidangnya pastilah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka kedua variabel tersebut tidak cocok diterapkan pada dinas atau SKPD, untuk itu dalam penelitian selanjutnya disarankan surveinya dilakukan di atas tingkatan dinas atau di beberapa kabupaten atau kota. Selain itu juga disarankan untuk menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti seperti kualitas SDM, pemahaman akuntansi dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arrens, Alvin A. Elder, Randal J, Beasley, Mark. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bachtiar, Arif. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, William, Raymon N. Johnson dan Walter G. Kell. 2002. *Modern Auditing, Edisi Ketujuh* Jakarta: Erlangga.
- Deddi, Nordiawan. Ayuningtyas, Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi, Martani. dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James A. 2011. *Accounting Information Systems, seventh Edition*. Mason. Cengage Learning
- Hery. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Husein, Muhammad Fahmi dan Wibowo, Amin. 2002. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nanang, Kusnandar. Lies, Yulianti. 2007. *Modul Praktikum Statistik*. Bandung. STIE STEMBI Bandung.
- Rahman, Pura. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Riduwan. dan Engkos, Achmad Kuncoro. 2012. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winwin, Yadiati dkk. 2010. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Wuryan, Andayani. 2008. *Audit Internal*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
- Aristanti, Widyaningsih. Alvian, Triantoro. Sugeng, Lili, Wiyantoro, 2011. Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening, Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. (Dipublikasikan).
- Darwanis. Dwi Mahyani, Desi. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. (Dipublikasikan).
- Gerry, Armando. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap

- Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang. (Dipublikasikan).
- Ifa, Ratifah. Mochamad, Ridwan. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung. (Dipublikasikan).
- Safrida, Yuliani. Nadirsyah. Usman, Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. (Dipublikasikan).
- Tuti, Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal. STIE STEMBI. Bandung. (Dipublikasikan).
- Tutun Hermawanto, Botutihe. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. (Dipublikasikan).
- BPK. 2013. *BPK RI Sampaikan LHP atas 21 LKPD Kabupaten/Kota*. <http://www.bpk.go.id>, 19 Juni 2013.
- BPK. 2013. *IHPS semester II*.
- Okezone. 2013. *Temukan 13.969 Kasus, BPK Sebut Ini Masih Kecil*. <http://www.okezone.com>, 01 Oktober 2013.

Perancangan Sistem Akuntansi Keuangan untuk Menunjang Kualitas Laporan Keuangan pada MI Miftahul Falah

Aceng Kurniawan

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Siska Nur Apriliani

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

MI Miftahul Falah adalah sebuah yayasan pendidikan islam yang ingin membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang selama ini disajikan dianggap belum cukup dijadikan dasar pengambilan keputusan. Padahal adanya sistem akuntansi yang terintegrasi akan mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, Laporan keuangan tersebut menghasilkan informasi yang andal dan relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen MI Miftahul Falah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan, bentuk, dan isi laporan keuangan MI Miftahul Falah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah pihak manajemen MI Miftahul Falah dan perwakilan dari Yayasan Miftahul Falah yang berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Alat analisisnya menggunakan Regresi Linier Sederhana menggunakan SPSS Statistic 22.

Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa nilai R^2 untuk pengaruh Sistem Akuntansi (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 24.5%, sisanya sebesar 75.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Sedangkan hasil uji t nya menunjukan bahwa ada pengaruh yang tidak signifikan antara Sistem Akuntansi (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil pengaruh yang tidak signifikan ini dikarenakan Sistem Akuntansi yang ada pada MI Miftahul Falah belum memadai. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusianya mengenai pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pelaksanaan sistem akutansinya pun belum memadai. Oleh karena itu, untuk membantu mengatasi masalah yang ada pada MI Miftahul Falah, penulis membantu membuatkan perancangan Sistem Akuntansi untuk menunjang Kualitas Laporan Keuangan pada MI Miftahul Falah.

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan, dan Perancangan Sistem Akuntansi.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kini organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan telah bergerak dalam berbagai bentuk kegiatan, area pelayanan yang semakin luas, serta ukuran dari organisasi yang dapat dikategorikan sebagai raksasa dalam dunia bisnis. Bahkan beberapa yayasan dalam dunia pendidikan ternyata

mempunyai asset bernilai milyaran rupiah. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis, mereka menuntut diterapkannya *good governance* atau tata kelola organisasi yang baik pada yayasan. Maka dari itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dibuktikan. (Nainggolan, 2005).

Peran akuntansi dalam organisasi nirlaba adalah sebagai salah satu alat untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mendorong keterbukaan organisasi. Dengan sistem dan prosedur keuangan yang terstruktur, organisasi dapat dengan mudah memenuhi tuntutan transparansi kepada *stakeholder*-nya. Pelaporan yang tepat waktu dan diikuti dengan informasi yang tinggi dapat mendorong keterbukaan dan juga dapat menjadi umpan balik kepada internal organisasi. Manajemen organisasi dapat memperoleh masukan dalam menjalankan roda organisasi kedepannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi yang lebih akurat. Hingga pada akhirnya, keterbukaan yang ditunjukkan oleh organisasi tersebut dapat menarik dana atau rekan kerja baru yang dapat memperbesar cakupan layanan organisasi. (Nainggolan, 2005).

Yayasan adalah organisasi hukum yang biasanya menaungi sekolah-sekolah swasta. Yayasan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba) (Hasibuan, 2010). Sumber dana organisasi nirlaba ini biasanya tidak hanya dari pelayanan jasa yang diberikan melainkan juga dari para donatur yang rela menyumbangkan penghasilannya bagi orang lain (Sulistiyoningsih, 2013). Dalam organisasi nirlaba terdapat beberapa transaksi yang jarang atau bahkan tidak ditemukan pada organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan (IAI, 2009: 45.1). Namun dalam praktiknya, organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya.

Menurut Bastian (2006), peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah memberikan informasi keuangan untuk menunjang proses pengambilan keputusan, serta menyediakan informasi keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi pada entitas pendidikan tersebut.

Oleh karena itulah, para pengelola organisasi nirlaba terutama yang bergerak dibidang pendidikan harus mampu memberi-

kan laporan keuangan yang baik kepada para penyumbang. Pihak manajemen organisasi harus dapat merumuskan bagaimana caranya menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba kepada pihak internal dan pihak eksternal agar para penyumbang tidak kehilangan kepercayaan dan menghentikan sumber dana terhadap organisasi nirlaba yang dikelolanya (Sulistiyoningsih, 2013).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi nirlaba pada donatur atau penyedia sumber daya maka organisasi nirlaba harus mengkomunikasikan pertanggungjawaban tersebut melalui laporan keuangan. Karena pentingnya laporan keuangan bagi organisasi nirlaba, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Di dalam PSAK No. 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya (Sulistiyoningsih, 2013). Standar ini dibuat sebagai konsensus bersama yang dapat digunakan agar informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat secara maksimal dan memperkecil resiko multi tafsir / bias dari informasi tersebut.

MI Miftahul Falah adalah sebuah yayasan pendidikan islam yang ingin membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang selama ini disajikan dianggap belum cukup dijadikan dasar pengambilan keputusan. Padahal adanya sistem akuntansi yang terintegrasi akan mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga. Laporan keuangan tersebut menghasilkan informasi yang andal dan relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen MI Miftahul Falah.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana MI Miftahul Falah membentuk laporan keuangannya agar berkualitas
2. Apakah laporan keuangan yayasan telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45

Sistem Akuntansi

Secara Etimologi, kata sistem sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *Systema*, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *System*. Marshall (2011) mengatakan bahwa sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Krismiaji (2010:23) mengatakan bahwa sistem akuntansi adalah mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi bisnis secara efisien dan efektif, menghasilkan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan, melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat, serta untuk melindungi data tersebut dan aktiva lain yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi 2016:3).

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Akuntansi adalah :

1. Bukti transaksi, Mulyadi (2016:3) mengatakan bahwa unsur suatu sistem akuntansi pokok terdiri dari formulir / bukti transaksi. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi. Dengan formulir ini, data yang terkait dengan transaksi akan direkam untuk pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan keuangan suatu organisasi.
2. Kode Rekening, pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Tujuan digunakannya kode rekening adalah untuk mengidentifikasi data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklasifikasi akun atau transaksi, dan menyampaikan makna tertentu (Mulyadi, 2016 :4).
3. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016: 4).
4. Laporan, Menurut Mulyadi (2016:4), salah satu unsur sistem akuntansi pokok adalah laporan. Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, dan daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.
5. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016:129). Tiga unsur pengendalian internal yang digunakan pada penelitian ini yaitu:
 - a. Dokumen bernomor urut tercetak merupakan salah satu mekanisme untuk mengendalikan asset organisasi serta dapat juga dijadikan alat untuk mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, dengan melihat lengkap atau tidaknya dokumen berdasarkan nomor urut yang tercetak.
 - b. Pemisahan fungsi, menurut Mulyadi (2016 : 130) mengatakan bahwa salah satu unsur sistem pengendalian internal adalah organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara tegas. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat *internal check* diantara unit organisasi pelaksana. Perangkapan fungsi akan membuka peluang terjadinya pencatatan transaksi

yang sebenarnya tidak terjadi.

- c. Otorisasi, sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya. Sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat (Susanto, 2008:38). Informasi keuangan merupakan hasil pengolahan data keuangan yang memberikan arti dan manfaat. Namun, tidak semua hasil pengolahan tersebut berkualitas yang memberikan makna dan manfaat bagi para penggunanya. Susanto (2008:13) mengatakan bahwa ciri-ciri kualitas laporan keuangan adalah:

1. Akurat, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut benar-benar mencerminkan situasi dan kondisi yang ada.
2. Relevan, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
3. Tepat waktu, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan
4. Lengkap, dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan tersebut telah selengkap yang dibutuhkan.

Menurut Krismiaji (2010) kualitas informasi akuntansi adalah relevan, dapat percaya, lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dapat diuji kebenarannya. Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan suatu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP Mei 2009. Alasannya karena kualitas laporan keuangan menurut SAK ETAP lebih lengkap. Berikut adalah karakteristik laporan keuangan dilihat dari segi kualitas berdasarkan SAK ETAP Mei 2009:

1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh

pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.
4. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika

dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. **Substansi Mengungguli Bentuk**
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
6. **Pertimbangan Sehat**
Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.
7. **Kelengkapan**
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.
8. **Dapat Dibandingkan**
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9. **Tepat Waktu**
Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.
10. **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

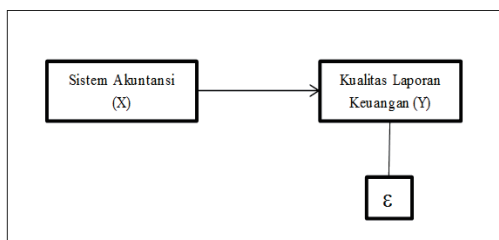
Indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas Laporan Keuangan adalah karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP Mei 2009, yang terdiri dari:

- 1) Dapat dipahami
- 2) Relevan
- 3) Materialitas

- 4) Keandalan
- 5) Pertimbangan Sehat
- 6) Dapat dibandingkan
- 7) Tepat waktu
- 8) Keseimbangan biaya dan manfaat

Sistem Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Permadi (2013) juga menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga dengan Roviyantri (2012) yang menemukan bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.



Gambar 1
Paradigma Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan
- H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu penelitian yang merinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (*Quantitative Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung melalui observasi di lapangan dan wawancara langsung dengan informan, serta kuesioner. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini, penulis dapatkan melalui studi dokumen yang bersumber dari laporan keuangan MI Miftahul Falah, hasil studi dari berbagai literature dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian untuk mempertajam kredibilitas penelitian, serta buku-buku yang mendukung teori penelitian.

Adapun rincian data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. Deskripsi tentang objek penelitian, yaitu berupa kondisi umum MI Miftahul Falah.
2. Fakta dan informasi yang terkait dengan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada MI Miftahul Falah.
3. Fakta dan informasi dari petugas terkait dengan asset yang dimiliki oleh MI Miftahul Falah.
4. Dokumen berupa catatan-catatan yang menjadi arsip keuangan pada MI Miftahul Falah.
5. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Revisi 2011
6. Buku-buku yang ditulis oleh para pakar dibidangnya sehingga dapat mendukung teori penelitian.
7. Hasil studi dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:224). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*deep interview*), studi dokumentasi, dan kuesioner.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, karena seperti yang diungkapkan menurut Sugiyono (2014 : 277) yang mengatakan bahwa analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional. Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.546	5.311			4.057	.010		
X	.302	.237	.495		1.274	.259	1.000	1.000

a. Dependent Variable: y

Sumber :Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk membuat persamaan regresi linier

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel Terikat

X₁ = Variabel bebas pertama

a, b = Konstanta

Konstanta a atau yang disebut intersep dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients*, dimana nilai a adalah 21.546. Sedangkan untuk koefisien b atau yang disebut slope sebesar 0.302. Sehingga hasil tersebut dapat kita susun menjadi persamaan regresi menjadi :

$$Y = 21.546 + 0.302X + \epsilon$$

Dari persamaan tersebut jika diterjemahkan ke dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika variabel Sistem Akuntansi dianggap konstan (tetap) maka rata-rata Kualitas Laporan Keuangan sebesar 21.546 satuan.
2. Jika variabel Sistem Akuntansi dinaikan 1 satuan maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan naik sebesar 0.302 satuan.

Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Setelah semua asumsi-asumsi regresi terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti akan menginterpretasikan hasil analisis regresi yang telah diperoleh. Dalam menganalisis hasil regresi ini, ada dua hal penting yang akan peneliti bahas yaitu analisa koefisien determinasi (R²) dan uji t. Analisa Koefisien Determinasi (R²) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.495 ^a	.245	.094	1.23777	1.373

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Sumber :Pengolahan Data

Dari Tabel *Model Summary* di atas dapat diketahui besarnya R² yaitu 0.245. Artinya adalah terdapat pengaruh sebesar 24.5 % antara variabel Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sisanya sebesar 75.5% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti atau yang disebut epsilon (ε).

Uji t

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat variabel independen (X) mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependent (Y). Uji t bisa dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai *t*_{hitung} dan *t*_{tabel}. Jika *t*_{hitung} > *t*_{tabel}, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Akuntansi (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Keputusan sebaliknya jika *t*_{hitung} <

t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Akuntansi (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Cara yang kedua yaitu membandingkan nilai sig dengan α . Jika nilai sig < α , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Akuntansi (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Namun jika nilai sig > α , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Akuntansi (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Nilai t_{hitung} terdapat pada tabel Coefficients, sedangkan nilai t_{tabel} maka harus melihat pada tabel distribusi t pada derajat $\alpha = 0.05$ dengan df = 5.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.546	5.311		4.057	.010		
X	.302	.237	.495	1.274	.259	1.000	1.000

a. Dependent Variable: y

Sumber :Pengolahan Data

Dari Tabel di atas, maka dapat kita ketahui nilai $r_{CMZ?A@}$ dari variabel bebas Sistem Akuntansi. Sedangkan nilai $r_z \text{ @}$ ialah nilai distribusi *t-student* pada taraf nyata 1 5% dengan df = n - k - 1 = 7 - 1 - 1 = 5 adalah . untuk lebih jelasnya ada pada Tabel 4.31 sebagai berikut :

Tabel 1 Uji t

CARA	SYARAT	HASIL	KESIMPULAN
1. Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}	$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima	1.274 < 2.571	Tidak Signifikan
	$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak		
2. Membandingkan nilai sig dengan α	sig < α , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima	0.245 > 0.05	Tidak Signifikan
	sig > α , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak		

Sumber :Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X) terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keua-

ngan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $1.274 < 2.571$. Selain itu, dapat pula melakukan uji t dengan membandingkan nilai α dengan sig. Seperti yang tertulis pada tabel 4.31, nilai signifikan lebih besar daripada taraf nyata $\alpha = 5\%$ yaitu $0,245 < 0,05$. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel Sistem Informasi Akuntansi (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015), Permadi (2013), dan juga dengan Roviyantri (2012) yang menemukan bahwa secara parsial. Namun, tidak signifikannya pengaruh sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan pada Sistem Akuntansi yang ada pada MI Miftahul Falah saat ini belum memadai tidak sama seperti pada sampel lainnya yang dipilih oleh para peneliti terdahulu. Dimana mereka melakukan penelitian pada sampel yang Sistem Akuntansinya sudah berjalan dengan baik. Belum memadainya Sistem Akuntansi yang ada pada MI Miftahul Falah saat ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia tentang pemahaman akuntansinya. Contohnya belum dibuatnya kode rekening sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi setiap akun atau rekening. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum paham fungsi dari kode rekening. Padahal pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan (Mulyadi, 2016 :101)
2. Prosedur yang dimiliki oleh MI Miftahul Falah saat ini belum terdokumentasi dengan baik atau belum disusun sebagai SOP.
3. Setiap aktivitas keuangan yang dilakukan belum seluruhnya didukung oleh bukti transaksi yang memadai.
4. Laporan keuangan yang selama ini dibuat oleh MI Miftahul Falah hanyalah Laporan Arus Kas, belum disertai elemen laporan

keuangan lainnya. Padahal lengkapnya elemen laporan keuangan itu dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan donatur terhadap pengelolaan donasi yang mereka berikan. Karena semakin lengkap elemen laporan keuangan yang disajikan, semakin banyak informasi yang diterima oleh donatur.

5. Pengendalian internal pada MI Miftahul Falah belum cukup baik. Meskipun pemisahan fungsi dan otorisasi sudah berjalan namun kontrol terhadap praktik sehat yang masih sangat lemah. Seperti dengan memberikan nomor urut tercetak pada dokumen transaksi. Hal ini ditujukan untuk membatasi penggunaan dokumen hanya untuk transaksi yang benar-benar terjadi. Sehingga setiap dokumen yang ada bisa ditelusuri untuk transaksi mana dan kapan dokumen itu dibuat.

Semua keterbatasan yang telah dijelaskan diatas juga berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan, berikut penjelasannya :

1. Laporan keuangan tidak terlalu dipahami oleh seluruh penggunaanya
2. Laporan keuangan tidak terlalu relevan dengan kebutuhan penggunaanya
3. Masih terjadi kesalahan yang material sehingga informasi pada laporan keuangan yang disajikan menjadi bias.
4. Karena informasi yang disajikan masih bias maka informasi tersebut tidak cukup andal untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.
5. Jika informasi pada laporan keuangan tidak cukup andal untuk pengambilan keputusan hal ini juga menyebabkan lembaga kesulitan untuk mengoreksi kesalahan dimasa lalu dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi masa depan.
6. Informasi pada laporan keuangan yang tidak lengkap mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan para pengguna
7. Lemahnya pengendalian internal salah satunya disebabkan oleh tidak ada *cut off*

kapan laporan keuangan harus diterbitkan setiap periodenya.

8. Meskipun biaya dalam pembuatan laporan keuangan saat ini rendah, namun tingkat utilitasnya pun rendah bahkan bisa berbahaya karena jika informasi keuangan itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka bisa menyesatkan penggunaanya.

Padahal adanya sistem akuntansi yang terintegrasi akan mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga laporan keuangan tersebut menghasilkan informasi yang andal dan relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen MI Miftahul Falah. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi (2016 : 15) yang menuliskan bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah :

1. Untuk menyediakan informasi bagi kegiatan usaha baru
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkay keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekeayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. MI Miftahul Falah belum membentuk laporan keuangan yang berkualitas. Karena pelaksanaan Sistem Akuntansi pada MI Miftahul Falah belum memadai. Hal ini terlihat pada skor akhir rata-rata pembobotan variabel Sistem Akuntansi yang berada pada kategori sedang. Namun skor per indikatornya masih banyak yang berada pada kategori rendah.
2. MI Miftahul Falah belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK

No. 45. Hal ini dibuktikan dengan hasil pembobotan kualitas laporan keuangan MI Miftahul Falah yang berada pada kategori sedang. Itu artinya kualitas informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan MI Miftahul Falah belum cukup dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan. Karena dari skor pembobotan per indikatornya pun masih banyak yang berada pada kategori rendah.

SARAN

1. Saran Operasional

Untuk mengoptimalkan fungsi sistem akuntansi pada MI Mifathul falah maka sebaiknya hal yang harus dilakukan adalah memberi pelatihan dan pendidikan akuntansi terhadap bagian-bagian yang terkait dengan proses pencatatan keuangan.

a. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan lebih untuk memperbaiki sistem akuntansi pada MI Miftahul Falah. Hal tersebut terlihat pada skor indikator-indikator yang masih berada pada kategori sedang dan rendah. Serta disarankan untuk menerapkan perancangan sistem akuntansi. Karena perancangan sistem akuntansi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan tertulis bagi MI Miftahul Falah untuk memperbaiki sistem akuntansinya yang belum memadai. Sehingga, dengan semakin optimalnya fungsi sistem akuntansi pada MI Miftahul Falah akan berdampak positive terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang disajikan.

2. Saran Pengembangan Ilmu

Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penulis sarankan pada peneliti selanjutnya yaitu

a. Tambahkan variabel independen untuk mengukur pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, misalnya pemahaman akuntansi, dll.

b. Penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi pada kualitas laporan keuangan sebaiknya dilakukan pada sampel yang sistem akuntansinya belum memadai. Agar manfaat pada penelitian yang dilakukan dapat terasa langsung di tempat penelitian itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Dewi, dan Yusrawati (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015 : Riau.
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga : Jakarta.
- Hasibuan, David (2010). *Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara dalam Kaitannya dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 12 STIE Kesatuan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45*. Salemba Empat: Jakarta.
- (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. DSAK Ikatan Akuntansi Indonesia : Jakarta.
- Krismiaji (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan ketiga. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Marshall, B. Romney Paul John Steinbart (2011). *Accounting Information System*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mulyadi (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta.
- Nainggolan, Pahala (2005). *Akuntansi Keuangan Yayasan*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Permadi, Angga Dwi (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama : Bandung.

- Roviyanti, Devi (2012). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- ___ (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Untuk pendidikan*. Alfabeta : Bandung
- Susanto, Azhar (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya : Bandung.

Pengaruh *Cash Ratio* Dan *Loan To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas (Survey Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional)

Tuti Herawati

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Kin-Kin Kania

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara likuiditas Cash Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas (Return on Asset) perusahaan yang bergerak di sektor perbankan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional periode 2012-2014. Sampel yang di pilih dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial Cash Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (Return On Asset) dan Loan To Deposit Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (Return On Asset). Secara simultan Cash ratio dan Loan To Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Return On Asset). Kemampuan prediksi variable Cash Ratio dan Loan To Deposit Ratio terhadap profitabilitas (ROA) adalah 7,1% sedangkan sisanya 92,9% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kata kunci : Likuiditas, *Cash Ratio*, *Loan To Deposit Ratio*, Profitabilitas, *Return On Asset* dan Analisis Regresi

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya. **(Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998)**.

Perkembangan dunia perbankan yang sangat pesat disertai dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja suatu bank. Komplektivitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko yang akan

dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi dalam dunia perbankan diantaranya di sebabkan oleh depresiasi rupiah, serta peningkatan suku bunga sertifikat Bank Indonesia sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini di picu karena lemahnya kondisi internal Bank seperti lemahnya kinerja manajemen bank, serta lemahnya bank dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang akan dihadapi sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.

Untuk mengukur kinerja suatu perbankan diperlukan laporan kinerja keuangan, salah satu pengukur kinerja keuangan perbankan yaitu dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas adalah suatu

kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Kegunaan dari profitabilitas ini biasanya digunakan oleh investor dalam menanamkan modalnya untuk berinvestasi, nasabah dalam melihat kesehatan bank untuk menanamkan (menabung) dananya dan Bank Indonesia sebagai regulator dalam melihat kinerja operasional bank. Profitabilitas juga penting bagi suatu bank, dimana profitabilitas ini digunakan untuk melihat perkembangan bank dalam hal memperoleh laba. Kinerja manajemen yang tidak efektif dan terorganisir tentu akan mengakibatkan tingkat profitabilitas yang diperoleh rendah. (Indra Ayu Oktaviana 2013)

Bertitik tolak pada latar belakang dan parameter di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“Pengaruh *Cash Ratio* Dan *Loan To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang hendak dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaruh dari *Cash Ratio* secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014?
2. Bagaimana pengaruh *Loan to Deposit Ratio* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014 ?
3. Bagaimana pengaruh *cash ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014?

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *cash ratio*, *Loan to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2012-2014.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *Cash Ratio* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *Loan to deposit Ratio* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *Cash Ratio* dan *Loan to deposit ratio* secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Bank

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1, butir 2).

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1, butir 3).”

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Falsafah yang mendasari usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. (Apriyansyah 2010)

1. Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain: dana yang bersumber dari modal sendiri berupa setoran dari pemegang saham, laba bank yang belum dibagi, cadangan-cadangan lain.

2. Alokasi Dana Bank

Pengalokasian dana bank harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tercapainya tingkat profitabilitas yang tinggi serta terjaganya likuiditas sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi, serta terjaganya likuiditas sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

Jenis Bank

Menurut **Kasmir (2012:20)**, Jenis Bank dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

• Dilihat dari segi fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan bank jenis lainnya

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pokok RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, maka jenis bank terdiri dari dua jenis bank, yaitu :

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

• Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini diperuntukkan bagi pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah pusat antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri sedangkan bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi. Contohnya : BPD (Bank Pembangunan Daerah) DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

2. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula, pembagian keuntungannya untuk swasta. Contohnya : Bank Bumi Putera, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, dan bank swasta lainnya, termasuk bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

3. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya : ABN AMRO (Algemene Bank Nederland (ABN) dan De

Amsterdamsche-Rotterdamsche Bank) Bank, American Express Bank, Bank Of America, Bangkok Bank, Bank Of Tokyo, dan bank Asing lainnya

4. **Bank milik campuran**

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dimana, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Mitsubishi Buana Bank, Sumitomo Niaga Bank, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, dan bank campuran lainnya

• **Dilihat dari segi status**

1. **Bank devisa**

Bank berstatus devisa atau bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran latter of Credits (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. **Bank non devisa**

Bank dengan status bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi, seperti halnya bank devisa.

• **Dilihat dari segi cara penentuan harga**

1. **Bank yang berdasarkan prinsip konvensional**

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

Menetapkan bunga sebagai harga beli baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga jual untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2. **Bank yang berdasarkan prinsip syariah**

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana maupun pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan dengan berdasarkan prinsip syariah juga sesuai syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rosul.

Laporan Keuangan

Kasmir (20014:7) menjelaskan pengertian laporan keuangan secara sederhana adalah laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan menurut **S. Munawir** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini, sudah menjadi kebiasaan bagaimana perseroan untuk menambah daftar kinerja, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan)”. (**S.Munawir 2012:89**)

Pihak-pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan.

Pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan antara lain: pemilik bank, nasabah pemakai dana, nasabah pemasok dana, karyawan, masyarakat, per-

pajakan, pemerintah, bank lain. Masing masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda antara satu sama lain. Bahkan tidak jarang perbedaan kepentingan ini yang menjadikan tantangan bagi manajer untuk dapat menghadapinya dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengambil keputusan.

4 Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan sangat diperlukan bagi penilaian prestasi usaha yang sudah dilakukan oleh sebuah bank, terutama bagi manajemen penyusunan kebijaksanaan strategi bank. Banyak jenis analisis rasio keuangan yang umum berlaku di dalam bank. Tetapi ada juga alat analisis rasio keuangan lainnya yang lebih khusus dan berkembang dari kalangan perbankan.

Menurut **Kasmir (2014:104)** mengemukakan bahwa pengertian analisis rasio keuangan sebagai berikut :

“Analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya”. (2014 : 104)

Sedangkan menurut **S. Munawir** menjelaskan tentang analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

“Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembandingan yang digunakan sebagai standar”. (2012 : 64)

Ratio Likuiditas Pada bank

Likuiditas menurut Simorangkir adalah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo (**Simorangkir 2004 : 141**)

Sedangkan menurut (**Kasmir 2014 : 221**) Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat di tagih. Dengan kata lain bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat di tagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini makin liquid.

Cash Ratio

Cash ratio menurut **Simorangkir** merupakan perbandingan antara alat likuid dan dana pihak ketiga. Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan bank membayar simpanan nasabah (deposan) pada saat di tarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. (**Simorangkir 2004 : 147**)

Sedangkan menurut **Kasmir** mengemukakan bahwa *Cash Ratio* adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera di bayar dengan harta likuid yang di miliki bank tersebut (**Kasmir 2014 : 224**)

Pengukuran Cash Ratio

Pengukuran (*Cash Ratio*) dengan Rumus menurut **Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001**

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman Yang harus segera di bayar}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa likuid asset adalah total alat likuid yang dimiliki bank. Sedangkan Pinjaman yang harus segera dibayar adalah jumlah besar dana yang di himpun Bank dari masyarakat seperti (giro, tabungan dan deposito).

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to deposit Ratio Menurut Simorangkir adalah perbandingan antara kredit yang di berikan dan dana pihak ke tiga termasuk pinjaman yang di terima, tidak termasuk pinjaman subordinasi (**Simorangkir 2004 :**

147)

Sedangkan pengertian *Loan to Deposit Ratio* Menurut **Kasmir** Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang di gunakan. Besarnya loan to deposit ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110 % . (**Kasmir 2014 : 225**)

Pengukuran *Loan to Deposit Ratio*

Pengukuran (*Loan to Deposit Ratio / LDR*) dengan Rumus menurut **Surat Edaran bank Indonesia No 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001** :

$$LDR = \frac{\text{total kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas maka dapat di jelaskan sebagai berikut bahwa Total Kredit yang dimaksud merupakan jumlah besar kredit yang disalurkan Bank kepada masyarakat. Sedangkan Total dana Pihak Ketiga adalah jumlah besar dana yang di himpun Bank dari masyarakat seperti (giro, tabungan dan deposito).

Profitabilitas

Menurut **Simorangkir 2004 : 152** yang dimaksud dengan profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba.

Sedangkan menurut **Kasmir 2014 : 218** rasio rentabilitas / profitabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas adalah salah satu aspek dalam penilaian kinerja bank. Tingkat profitabilitas perusahaan perbankan menunjukkan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh suatu bank dalam satu atau setiap periode.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas berdasarkan keadaan

normal jika dilihat pada sisi likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas maka jika rasio lancar (*current ratio*) yang tinggi akan menunjukkan posisi likuiditas yang kuat, tetapi juga sebaliknya menandakan adanya kas yang berlebihan yang tentunya tidak baik, hal ini berarti *current ratio* yang tinggi pada perusahaan menyebabkan profitabilitas perusahaan rendah dan sebaliknya, sedangkan pada rasio hutang (*debt ratio*) semakin tinggi rasio ini maka profitabilitas perusahaan menunjukkan nilai yang rendah karena semakin besar risiko yang akan terbebani oleh perusahaan dan sebaliknya. Jika dilihat dari sisi rasio aktivitas (*inventory turn over*), jika *inventory* terlalu besar dari kebutuhan akan memperbesar beban bunga, biaya pemeliharaan dan penyimpanan digudang kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian, maka profitabilitas perusahaan menurun dan sebaliknya. Semakin tinggi rasio menandakan semakin cepat perputaran asset, semakin baik perusahaan dalam mengelola asset yang ada pada perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return On Asset (ROA)* merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Menurut **Kasmir 2014** *Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu digunakan angka laba sebelum pajak dan rata-rata kekayaan perusahaan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntu-

ngan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut.

Rumus Perhitungan Return On Asset menurut **Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011**.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak} \times 100 \%}{\text{Rata-Rata Total Asset}}$$

Dari rumus diatas Maka dapat dijelaskan bahwa laba sebelum pajak yang dimaksud merupakan jumlah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum dikurangi pajak. Sedangkan Total Asset yang dimaksud adalah rata-rata volume usaha/aktiva.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah, kerangka pemikiran, dan paradigma penelitian, penyusun mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, adapun hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan adalah :

Hipotesis secara umum

Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara *cash ratio* dan *loan deposit ratio* terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) pada Sektor Perbankan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional.

Hipotesis Secara Parsial

Secara parsial, pengaruh antara *cash ratio* dan *loan deposit ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas diantaranya adalah :

Cash ratio berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.

Loan deposit ratio berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh *cash ratio* dan *loan to deposit ratio* terhadap *profitabilitas* Bak Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah *variabel independen* (variabel bebas) adalah *cash ratio* (X_1) dan *loan to deposit ratio* (X_2). Serta

yang menjadi *variabel dependent* (variabel terkait) adalah profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (Y).

Subjek pada penelitian ini adalah Sektor Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Yang bergerak dalam bidang perbankan. Sedangkan penelitian ini adalah kajian mengenai laporan keuangan publikasi per 31 Desember dan Rasio Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014.

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan survey. Metode penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala atau peristiwa (**Sugiyono 2012**).

Metode survey membedah dan menyoroti serta mengenali masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit baik secara sensus maupun sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yakni data yang dinyatakan dalam angka-angka menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan yang memuat informasi mengenai masalah yang di teliti, serta studi pustaka dengan cara membaca serta mendalami berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , menurut **Sugiyono (2012 : 225)** sumber data sekunder adalah : sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai

berikut :

- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik memperoleh informasi dari penelitian terdahulu, menelusuri literature yang ada, kemudian menelaahnya secara tekun.
- b. Laporan Keuangan Publikasi
Merupakan upaya untuk melengkapi data dalam rangka analisa masalah yang sedang diteliti dengan mencari informasi dari laporan keuangan publikasi Per 31 Desember tahun penelitian 2012-2014 yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengolah data-data yang diperlukan terutama pada laporan keuangan publikasi bank, yang diperoleh dari website masing masing bank umum yang di perlukan informasinya.

Teknik Pengumpulan Sample

Menurut **Sugiyono (2012: 80)**, “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan definisi di atas, maka yang termasuk dalam populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Periode 2012-2014.

Menurut **Sugiyono (2012 : 81)**, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang di pilih dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut **Sugiyono (2012 : 85)** *purposive sampling* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.

Kriteria-kriteria dari pemilihan sampel tersebut adalah :

- Laporan keuangan Publikasi lengkap periode 31 Desember (2012-2014)
- Data Rasio keuangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia

Maka ada 25 Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional yang terpilih menjadi sample.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Adapun dalam proses analisisnya menggunakan bantuan *software* SPSS v. 16.0 for Windows.

Hasil pengolahan penelitian yang terdapat pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisiensi ($R^2 / R Square$) adalah sebesar 0,071 atau 7,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *cash ratio* (X_1), *loan to deposit ratio* (X_2) mempengaruhi variabel *Return on Asset* (Y) sebesar 7,1% dan sisanya sebesar 92.9% dipengaruhi oleh variabel lain ($\epsilon/error$) yang tidak disertakan dalam penelitian.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama untuk variabel *cash ratio* (X_1), *loan to deposit ratio* (X_2), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Return On Asset* (Y). Dalam pelaksanaan pengujian

ini terlebih dahulu akan diuji secara statistik baru kemudian pengujian secara penelitian.

Uji F secara statistik salah satunya adalah menggunakan nilai dari F_{hitung} yang akan dibandingkan dengan F_{tabel} . Nilai F_{hitung} diambil dari pengolahan data penelitian dan hasilnya adalah sesuai dengan tabel *Anova* di atas pada kolom F yaitu sebesar **2,749** Sedangkan F_{tabel} sebesar **3,12** diambil dari tabel distribusi F (*F-Snedecor*) dengan df (*degree of freedom*) adalah 75 ($n-k-1/75-2-1=72$) pada derajat kesalahannya (α) 5%

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.266 ^a	.071	.045	1.65617	.939
a. Predictors: (Constant), LDR, CASH RATIO					
b. Dependent Variable: ROA					

dengan n untuk jumlah variabel bebasnya adalah 2 . Dari hasil pengolahan dan tabel maka didapat nilai untuk F dan pengujian statistiknya sebagai berikut;

Nilai F _{hitung}	Nilai F _{tabel}	Kesimpulan
2,749	3,126	Tidak Signifikan

Sumber : data olahan

Pengujian statistik menunjukkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ (nilai F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel}) maka kesimpulan dalam pengujian statistiknya adalah menerima H_0 dan **menolak H_1** . Berdasarkan pengujian statistik tersebut maka dapat diambil kesimpulan hipotesis penelitiannya dari hipotesis alternative atau (H_1). Jika pengujian secara statistik telah menolak H_1 maka pengujian secara penelitiannya pun menerima H_0 dengan bunyi hipotesisnya adalah variabel *cash ratio* (X_1), *loan to deposit ratio* (X_2), tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Return On Asset* (Y)

Signifikan secara Simultan ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.082	2	7.541	2.749	.071 ^a
	Residual	197.488	72	2.743		
	Total	212.570	74			
a. Predictors: (Constant), LDR, CASH RATIO						
b. Dependent Variable: ROA						

Uji t (Parsial)

Pada pengujian ini akan dilakukan pengujian secara terpisah untuk variabel *cash ratio* (X_1), *loan to deposit ratio* (X_2), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Return On Asset* (Y). Fungsi dari pengujian ini adalah untuk mencari dari variabel bebasnya yang paling mempengaruhi terhadap variabel terikat.

Dua tahapan dalam pengujian ini yaitu pengujian secara statistik dan pengujian penelitian. Pengujian statistik mengambil data dari hasil pengolahannya yaitu pada Tabel berikut ini pada kolom t atau kolom sig (α).

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.070	1.794		.596	.553		
CASH RATIO	-.049	.028	-.202	-1.728	.088	.945	1.058
LDR	.020	.018	.133	1.137	.259	.945	1.058

a. Dependent Variable: ROA

Salah satu pengujian secara statistik adalah membandingkan antara t_{hitung} (kolom t) dengan t_{tabel} sebesar 1,728 untuk df (*degree of freedom*) yaitu $(n-k-1/75-3-1)$ dan pada derajat kesalahannya (α) sebesar 5% (*two tailed*) adalah 72. Atau nilai t tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus interpolasi sebagai berikut

$$Y = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} (X - X_1) + Y_1$$

Dimana :

Y = Nilai t table untuk X

Y_1 = Nilai t table untuk X_1

Y_2 = Nilai t table untuk X_2

X = 72

X_1 = 70

X_2 = 80

Untuk pengujian statistik dan penganalisaan perbandingannya adalah dapat melihat Tabel sebagai berikut:

Pengujian Statistik untuk Uji t

No	Simbol Item	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
1	X_1	-1,728	1,666	Signifikan
2	X_2	1,137	1,666	Tidak Signifikan

Pengujian secara statistik tersebut pada tabel pengujian di atas menunjukkan bahwa t_{hitung} bernilai -1,728 untuk variabel *cash ratio* (X_1) mempunyai nilai lebih besar dari t_{tabel} yang bernilai 1,666, *Loan to deposit ratio* (X_2) mempunyai nilai lebih kecil dari t_{tabel} yang bernilai 1,666.

Berdasarkan pengujian statistik dan pengujian penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *cash ratio* (X_1) mempunyai pengaruh yang *negative* signifikan terhadap

Return On Asset (Y), *loan to deposit ratio* (X_2) mempunyai pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (Y)

Variabel *cash ratio* (X_1) dengan nilainya sebesar -1,728 dengan arahnya bernilai *negatif*. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X_1 dalam penelitian yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (Y)

Variabel kedua yaitu *loan to deposit ratio* (X_2) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (Y) dengan arahnya adalah Positif. Keterpengaruhannya tersebut bukan terkuat karena memiliki koefisien regresi yang lebih rendah yaitu sebesar 1,137 dari variabel bebas lainnya.

Kesimpulan secara umum yang dapat diambil dari pengujian persial adalah terdapat pengaruh secara negative signifikan berasal dari variabel *cash ratio* (X_1) terhadap *Return On Asset* (Y). Variabel *loan to deposit ratio* (X_2) memiliki pengaruh positif yang signifikan tetapi bukan yang terkuat terhadap *Return On Asset* (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Salah satu tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab identifikasi penelitian yang dijadikan sebagai kesimpulan penelitian. Jawaban dari identifikasi masalah yang dijadikan sebagai kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut;

1. *Cash ratio* (X_1) dan *loan to deposit ratio* (X_2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* (Y) secara simultan atau bersama-sama. Dengan besar R square 7,1 % sisanya 92,9% di pengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak ikut serta dalam penelitian.
2. Secara parsial *cash ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset*. Yang terlihat dari besarnya koefisien di persamaan regresi sebesar -0,049 artinya setiap kenaikan *cash ratio* Rp.1. maka *Return On Asset* perusahaan akan turun sebesar Rp. 0,049 dengan nilai signifikansi t hitung sama dengan -1,728.
3. *Loan to deposit ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial

terhadap *Return On Asset*. Yang terlihat dari besarnya koefisien di persamaan regresi sebesar 0,020 artinya setiap kenaikan *cash ratio* Rp.1. maka *Return On Asset* perusahaan akan naik sebesar Rp 0,020 dengan nilai signifikansi t hitung sama dengan 1,137. Hal ini dikarenakan banyaknya kredit yang mengalami kegagalan.

Saran

Dalam penelitian ini penulis mengakui masih banyak kekurangan karena keterbatasan dari penulis baik waktu, tenaga, maupun pikiran. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik keterbatasan dari sisi penulis maupun dari pihak yang diteliti. Harapan bagi peneliti untuk menutupi keterbatasan tersebut mengartikan beberapa *point* yang akan dituangkan ke dalam saran-saran baik bagi peneliti maupun yang diteliti, diantaranya; berkaitan dengan implikasi pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengaruh *Cash Ratio*, *Loan Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas. Agar memperoleh gambaran yang lebih dalam dan lebih komprehensif, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menambah variabel - variabel lain seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, *Quick ratio*, *Banking Ratio*, *Investing policy ratio*, *Asset to loan ratio*, *Investment portfolio ratio*, *Capital Asset Ratio*, *Deposit risk ratio*, *Credit Risk ratio* dan lain lain untuk mengukur profitabilitas agar didapat analisis data yang lebih tajam dan akurat sehingga memperbesar R square dan mengurangi eror atau factor lain yang mempengaruhi penelitian. Untuk menambah manfaat yang lebih besar dari penelitian, maka sebaiknya penelitian ini dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya secara continue, untuk memberi informasi kepada para investor dalam berinvestasi.
2. Berkaitan dengan variable *Cash Ratio* yang menjadi variable yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas (ROA) karena CR menentukan tinggi rendahnya

dana yang dapat dikucurkan untuk kredit dan mempengaruhi tinggi rendahnya laba pada sektor perbankan. Maka Bank memerlukan banyak investor yang menginvestasikan dana-dananya sebagai alat likuid sehingga dapat memenuhi permintaan kredit para nasabahnya yang tentunya dapat mempengaruhi laba perusahaan.

3. Berkaitan dengan variable *loan to deposit ratio* dalam penelitian maka Bank harus menekankan kepada para nasabah yang di berikan kepercayaan atas pinjaman untuk lebih lancar dan tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya sehingga mengurangi kemacetan kredit yang berimbas kepada laba perusahaan yang membuat bank tersebut tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 1999. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Urusan Hukum Bank Indonesia. Jakarta.
- Harahap ,Sofyan, Syafri. 2008. *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Edisi pertama Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan* . Edisi Pertama. Cetakan Ke Tujuh. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Munawir, S. 2012. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Cetakan keenam Belas. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Oktaviana, Ayu, Indra.2013. *Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Bumi Arta Tbk*. Jurnal Ekonomi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pandia, Frianto,dkk. 2009. *Lembaga Keuangan*. Cetakan Pertama. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Putri, Nindya, Andiena. 2003. *Pengaruh Likuiditas (Cash Ratio dan Loan to Deposit Ratio) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Sektor Perbankan yang tercatat di BEI Periode amatan 2008-2012*. Jurnal Ekonomi. Universitas Udanaya.
- Rahman, Apriansyah. 2010. *Pengaruh Cash Ratio, Loan to Deposit ratio, dan Capital Asset Ratio terhadap Profitabilitas pada Sektor Perbankan Yang terdaftar di BEI*. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Silvanita. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit Erlangga . Universitas Kristen Indonesia.
- Simorangki,O.P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Cetakan Kedua. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. “ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*”. Cetakan ke tujuh belas. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24 DPNP. 2011. *Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Susilo, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Sinar Grafika. Jakarta.
- <http://idx.co.id>
- <http://www.bi.go.id>

Pengaruh *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Meilani Purwanti

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Surini

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, maka sistem administrasi perpajakan pun mengalami modernisasi. Salah satunya yaitu menggunakan pelayanan wajib pajak berbasis internet yang beberapa diantaranya adalah e-registration, e-SPT dan e-filing. Dengan adanya pelayanan berbasis internet ini diharapkan dapat membantu meningkatkan good governance dan bagi wajib pajak akan mendapatkan kemudahan serta kepraktisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode survey sehingga data yang diperoleh adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling untuk pengambilan sampel. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa e-registration, e-SPT dan e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Pengaruh secara simultan sebesar 50,8% artinya sebesar 49,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini seperti e-Billing dan e-Payment.

Kata kunci: *e-Registration, e-SPT, e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Secara umum, istilah pajak bukan lagi hal yang asing atau jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Diberbagai media massa, apalagi media khusus dibidang ekonomi, keuangan, atau bisnis, sangat sering kita jumpai atau lihat bahkan baca dalam bentuk berita, informasi atau tulisan tentang pajak. Hal ini menunjukkan betapa semakin berkembangnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai pajak di negara kita, baik dari aspek berita, pengetahuan maupun pelaksanaannya.

Bila ditelaah lebih jauh lagi, pajak telah menjadi fenomena umum yaitu sebagai pene-

rimaan negara, terutama di negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pajak bahkan dapat dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar kepedulian serta jiwa patriotisme masyarakat kepada bangsa dan negaranya.

Sejak pemerintah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang pertama kali tahun 1983, sangat terasa dinamisasi perkembangan pengelolaan pajak di negara kita, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat (Wajib Pajak). Perjalanan reformasi perpajakan selama tiga dasawarsa

ini menyangkut berbagai unsur mendasar yaitu mengenai sistem perpajakan dan administrasi pajak, institusi, bahkan sumber daya manusia perpajakan. Dalam praktiknya, reformasi perpajakan disatu sisi untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas pemungutan pajak oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan disisi lain untuk peningkatan kepatuhan perpajakan (Pandriangan, 2014).

Devano dan Rahayu (2006 : 112) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Jika beberapa faktor tersebut dijalankan dengan baik, maka tingkat kepatuhan serta penerimaan pajak akan meningkat. Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, maka sistem administrasi perpajakan pun mengalami modernisasi. Salah satunya yaitu menggunakan pelayanan wajib pajak berbasis internet yang beberapa diantaranya adalah *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing*. Dengan adanya pelayanan berbasis internet ini diharapkan dapat membantu meningkatkan *good governance* dan bagi wajib pajak akan mendapatkan kemudahan serta kepraktisan.

Arumsari (Seksi Pelayanan KPP Pratama Cirebon, 10/11/2015) mengatakan bahwa aplikasi pendaftaran wajib pajak melalui *e-registration* masih terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Karena untuk wajib pajak badan, aplikasi *e-reg* yang digunakan belum berfungsi secara maksimal. Data-data yang diunggah tidak semuanya muncul pada monitor. Jadi, untuk wajib pajak badan masih menggunakan pendaftaran manual. Jika pendaftaran melalui aplikasi *e-registration* sudah diteliti dan diproses, maka selanjutnya berkas KTP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dicetak sebagai bukti validasi. Kemudian berkas tersebut diproses kembali untuk dicetak menjadi kartu NPWP.

Kemudian perihal tata cara penyampaian, isi, jenis dan bentuk SPT semua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014. Dalam pengisian

SPT, wajib pajak kini sudah dimudahkan oleh adanya aplikasi *e-SPT* dimana wajib pajak hanya memasukkan data berupa angka sesuai dengan apa yang diminta pada kolom pengisian tanpa harus terhubung dengan internet. Dan secara otomatis aplikasi *e-SPT* tersebut akan menghitung pajak yang harus disetorkan. Namun dalam penggunaan aplikasi *e-SPT* terdapat beberapa kasus seperti status SPT tidak sesuai antara fisik dan elektronik, *compact disk* atau *flashdisk* tidak terbaca oleh komputer, kesalahan pada sistem komputer ataupun kesalahan pengisian data oleh wajib pajak (Prabowo, Seksi Pelayanan On Job Training KPP Pratama Cirebon, 18/11/2015).

Sama halnya dengan aplikasi *e-SPT*, *e-filing* juga memiliki peranan yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Bedanya adalah aplikasi *e-filing* harus terhubung dengan internet karena aplikasi tersebut ada pada situs pajak www.pajak.go.id. Pembayarannya pun cukup dengan transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau menurut sistem perpajakan disebut *e-payment*. Namun tidak seluruh wajib pajak mengikuti perkembangan teknologi sehingga mereka masih memilih untuk melaksanakan sistem perpajakan secara manual. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Seberapa besar pengaruh *e-spt* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Seberapa besar pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Seberapa besar pengaruh *e-registration*, *e-spt* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

e-Registration

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak (**Fidel, 2010:55**). Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line* ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian yaitu pertama, sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line*, dan *kedua* sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak (**Fidel, 2010:55**).

Proses kerjanya, berdasarkan permohonan yang disampaikan masyarakat, sistem *e-registration* akan memberikan formulir registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, NPWP dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang antara lain mencantumkan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak mencetak formulir registrasi Wajib Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara, dan menandatangani formulir registrasi Wajib Pajak. Adapun Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan dan digunakan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan (**Fidel, 2010:55**).

Kemudian, Wajib Pajak menyampaikan formulir yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Jika formulir regis-

trasi Wajib Pajak beserta persyaratannya tersebut belum diterima oleh KPP, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem. Dalam hal proses penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai, Wajib Pajak dikirimkan Notifikasi melalui sistem *e-registration*. Notifikasi adalah pemberitahuan mengenai status permohonan Wajib Pajak dalam *e-registration* (**Fidel, 2010:55**).

Setelah itu, **Fidel (2010:56)** menjelaskan bahwa wajib pajak yang telah terdaftar, namun belum mempunyai akses ke sistem *e-registration*, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem *e-registration* atas NPWP yang bersangkutan ke KPP tempat Wajib pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku.

Maka dari itu, **Fidel (2010:55)** juga mengatakan bahwa masyarakat yang akan mendaftar sebagai Wajib Pajak, jika tidak ada waktu, atau sedang berada ditempat/daerah lain, atau mungkin malas, tetap dapat melaksanakan pendaftaran tersebut dengan baik tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar. Cukup berada dirumah atau kantor atau warung internet duduk didepan layar komputer yang tersambung dengan internet dapat melakukan/memanfaatkan fasilitas *e-registration*.

Pandiangan (2008:5) berpendapat bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat ditengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi.

e-SPT

Fidel (2010:57) mengartikan bahwa *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pandiangan (2008:36) berpendapat

bahwa *e-SPT Masa PPh* adalah *SPT Masa PPh* dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari *DJP* kepada *Wajib Pajak* yang digunakan untuk merekam, memelihara data, *generate* data, dan mencetak *Masa PPh* beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke *KPP*.

Keunggulan dari *e-SPT PPh* adalah:

1. Penyampaian *SPT* dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan *Wajib Pajak* selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak *SPT induk*.
5. *Wajib Pajak* secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan *SPT-nya*.
6. Tidak diperlukan proses perekaman *SPT* beserta lampirannya di *KPP*, karena *Wajib Pajak* telah menyampaikan datanya secara elektronik.

Selain itu jenis *SPT* yang lain adalah *SPT PPN*, fasilitas *e-SPT PPN* menurut **Pandiangan (2008:37)** yaitu:

1. Perekaman data *SPT* beserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data *SPT* dan lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan *SPT induk*;
2. Perekaman data *SPT* Pembetulan beserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman *SPT* Pembetulan;
3. *User Profiles*, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggungjawabnya;
4. Memelihara data *Wajib Pajak* lawan transaksi, yang memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data *Wajib Pajak* lawan transaksinya;
5. Impor data lampiran, yang memiliki ke-

mampuan untuk mengimpor data *Faktur Pajak* dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan *Wajib Pajak* atau data *Faktur Pajak* hasil ekspor dari terminal sistem *e-SPT* lainnya;

6. *Generate* data digital *SPT*, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital *SPT* yang nantinya akan diberikan ke *KPP* dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara *online* melalui fasilitas yang disediakan oleh *DJP*; dan
7. Cetak *SPT*, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan *SPT* induk baik *SPT* induk *PPN* ataupun *SPT* induk *PPnBM*.

Sementara itu berikut beberapa keunggulan dari *e-SPT PPN* menurut **Pandiangan (2008:38)**:

1. Data perpajakan yang terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis;
2. Mempermudah dalam perhitungan perpajakan *SPT*. *Operator entry* hanya diperlukan untuk menginput data *SPT* dalam sistem aplikasi *e-SPT*, dan sistem aplikasi *e-SPT* akan melakukan penghitungan perpajakan yang dengan mudah dan akurat;
3. Kemudahan dalam pembuatan laporan perpajakan. Dengan hasil *entry* yang telah dilakukan *operator entry*, cukup dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan *SPT* dengan seluruh perhitungannya; dan
4. Mudah dan efisien untuk pelaporan pajak. Sistem aplikasi *e-SPT* memiliki kemampuan untuk membuat *SPT* dalam media penyimpanan (disket) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam pelaporan *SPT* ke kantor pajak (tidak perlu membuat laporan yang bertumpuk-tumpuk) dan memiliki keamanan yang pasti.

Menurut **Pandiangan (2014:191)** isi *SPT* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu *Bagian Induk* dan *Bagian Lampiran* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Isi masing-masing jenis *SPT* berbeda antara

Induk dan Lampiran namun saling berkaitan. Isi SPT paling sedikit memuat:

1. Nama WP, NPWP dan alamat WP;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
3. Tanda tangan WP atau kuasa WP.

Pandiangan (2014:193) juga menjelaskan bahwa formulir SPT dalam bentuk kertas (*hard copy*) atau aplikasi *e-SPT* dapat diperoleh dengan cara:

1. Diambil langsung di KPP atau KP2KP;
2. Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh WP/PKP dengan format yang telah baku;
3. Diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan / digandakan;
4. Disediakan oleh ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fidel (2010:57) memaparkan bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet, dimana perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer, atas penyampaian *e-SPT* maka penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT Induk, Wajib Pajak secara cepat, tepat dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.

e-Filing

Menurut **Pandiangan (2014:39)**, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Pandiangan (2014:194-196) juga mengatakan bahwa penyampaian SPT sebagai pelaporan pajak merupakan salah

satu kewajiban WP dan PKP yang mempunyai batas waktu jatuh tempo. Pasal 3 ayat (3) UU KUP menyatakan untuk SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan akhir (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Kemudian untuk sementara ini belum semua SPT dapat menggunakan *e-filing*, yaitu masih terbatas formulir SPT Tahunan 1770 S atau formulir SPT Tahunan 1770 SS dan SPT Masa PPN.

Proses untuk melakukan *e-filing* menurut **Fidel (2010 : 56)** adalah: Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari DJP. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan contoh surat permohonan yang telah ada, dengan melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Permohonan *e-filing* dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam *database (masterfile)* Wajib Pajak di DJP dan bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, maka telah menyampaikan:

1. SPT PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir;
2. SPT Masa PPN untuk 6 (enam) Masa Pajak terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, sedangkan kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan WP melaksanakan perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan DJP. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap WP (**Pandiangan, 2014 : 245**). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang disertai dengan pengaruh kepuasan pelayanan dari pemerintah.

Menurut **Pandiangan (2014:245-246)**, kriteria Wajib Pajak Patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi;
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir,
 - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut,
 - c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus

disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sementara itu, Chaizi Nasuha dalam **Devano dan Rahayu (2006 : 111)** juga menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Kemudian, **Devano dan Rahayu (2006 : 113)** mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh *e-Registration* (X₁) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dengan menggunakan sistem berbasis internet, masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi secara cepat dan mudah. Begitu pula dalam perpajakan, masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pendaftaran. Jika tidak ada waktu atau sedang berada di daerah lain, atau mungkin malas datang ke KPP, masyarakat tetap bisa melakukan pendaftaran menggunakan sistem aplikasi *e-registration*.

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak (Fidel, 2010:55). Hasil yang disimpulkan oleh Syafariani dan Nadeak (2012) bahwa peranan kualitas sistem *e-registration* secara keseluruhan adalah baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Didukung penelitian lain oleh Aini (2011) bahwa langkah konkrit upaya Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia berperan untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak dengan meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan pelayanan yang berbasis *e-registration* dimana sistem pendaftaran mempermudah Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara *online*.

Kegiatan sosialisasi juga dapat membantu peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftar menggunakan *e-registration*. Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan dari sistem *e-registration* baik dari Wajib Pajak maupun KPP Pratama Surabaya Wonocolo antara lain adalah:

1. Mempermudah bagi masyarakat yang ingin membuat NPWP secara cepat dan dapat diakses dimana saja.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masya-

rakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi di KPP.

3. Memberikan fasilitas terkini bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.
4. Mempermudah pembuatan NPWP yang lokasi Wajib Pajak jauh dengan KPP Domisili.
5. Memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak (Aini, 2011).

Kemudian Putra, Astuti dan Riyadi (2015) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengaruh penerapan sistem administrasi *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *e-SPT* (X₂) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan penerapan *e-SPT* guna melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya (Sari, Kertahadi dan Endang, 2013).

Penerapan *e-SPT* tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan *e-SPT* dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari (2014) menyimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan sistem komputerisasi pajak dengan program *e-SPT*. Hal ini berarti

sistem *e-SPT* memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Responden percaya jika menggunakan *e-SPT* dalam pelaporan pajak akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini membuktikan pula bahwa responden akan memanfaatkan sistem informasi *e-SPT* dalam pelaporan pajak apabila merasa mudah untuk memahami cara pengoperasiannya (**Sari, Kertahadi dan Endang, 2013**).

Didukung oleh penelitian lain yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan SPT secara elektronik tergolong kedalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP, serta efektivitas penerapan *e-SPT* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (**Handayani dan Supadmi, 2013**).

Pengaruh *e-Filing* (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Parwito dalam **Tresno, Pahala dan Rizky (2012)** mengatakan bahwa dengan *e-filing* wajib pajak dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi waktu pelaporan SPT, dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta mengurangi kesalahan dalam memasukan data SPT. Begitu pula menurut **Tresno, Pahala dan Rizky (2012)** dalam penelitiannya bahwa *e-filing* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

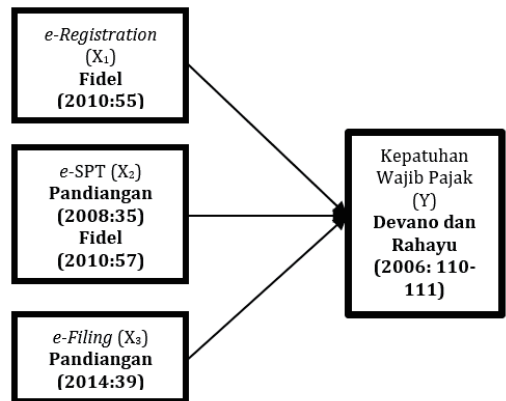
Teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan wajib pajak dalam mengelola *database* karena penyimpanan data dan dokumen wajib pajak sudah terkomputerisasi. Oleh karena sistem *e-filing* yang dapat menyampaikan data pelaporan SPT secara *online* dan *real time*, maka penelitian sebelumnya oleh **Astuti (2015)** menyatakan bahwa penerapan *e-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini diantaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program *e-filing* memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak

maupun aparaturn Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Penelitian lain menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi *e-filing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyampaian SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, ini berarti dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Cukup menggunakan media komputer yang terhubung langsung ke internet, maka penyampaian SPT dapat dilakukan (**Putra, Astuti dan Riyadi, 2015**).

Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelusuran teori dan hasil penelitian, maka model penelitian dapat dibuat dalam paradigma seperi dibawah ini:



Gambar 1
Kerangka Paradigma Penelitian
sumber : Paradigma Peneliti

HIPOTESIS

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara yang dapat disajikan sebagai berikut:

- H1: *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4: *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3). Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kedalam penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau pada sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (**Sugiyono, 2014:14**).

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode survey. Menurut **Sugiyono (2014:11)** Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (**Sugiyono, 2014:117**). Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (**Sugiyono, 2014 : 118**). Teknik sampling adalah merupakan teknik pengam-

bilan sampel (**Sugiyono, 2014:118**).

Simple Random Sampling, dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (**Sugiyono, 2014 : 120**). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon pada tahun 2015 sebanyak 286.796 Wajib Pajak. Dalam penentuan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga responden yang diambil adalah sebanyak 99,97 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Telaah kepustakaan

Telaah kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data secara sekunder, yaitu dengan cara mencari dan mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga penulis banyak mengumpulkan dan mengolah data dari jurnal dan artikel serta melalui situs internet.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (**Sugiyono, 2014:199**).

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. **Sugiyono, (2014 : 134)** menyatakan bahwa skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Dalam penelitian skala *likert*, pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan peneliti adalah Selalu / Setuju, Kadang-Kadang / Ragu-Ragu, Tidak Pernah /

Tidak Setuju. Dalam penelitian ini, penulis memberikan skor dari setiap jawaban responden berturut-turut diberi nilai 3,2,1 jika item pertanyaan berindikasi positif, dan sebaliknya setiap jawaban responden berturut-turut jika item pertanyaan berindikasi negatif.

Pengujian analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, karena tidak menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel secara jelas, sehingga dalam hal ini menarik kesimpulan adanya keterhubungan antar variabel tersebut secara nalar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh *e-registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-filing* (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) baik secara simultan maupun parsial. Dengan bantuan *software IBM SPSS Statistics 22* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1
Koefisien Regresi Dependen (Y)

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance			VIF	
1	(Constant)	4,111	1,231		3,341	,001		
	X1	,237	,089	,208	2,661	,009	,842	1,188
	X2	,533	,082	,477	6,467	,000	,942	1,061
	X3	,430	,102	,339	4,234	,000	,802	1,247

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Dari tabel 1 diatas pengujian menunjukkan persamaan regresi dengan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,111 + 0,237X_1 + 0,533X_2 + 0,430X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β) untuk variabel *e-registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-filing* (X₃) memiliki nilai positif (+), artinya variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel *e-registration* (X₁) memiliki nilai koefisien regresi (β₁) sebesar 0,237. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel *e-registration* (X₁) satu satuan nilai, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,237 satu satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol (0). Artinya, jika penggunaan *e-registration* meningkat maka kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon akan semakin meningkat.

Dan untuk variabel *e-SPT* (X₂) memiliki nilai koefisien regresi (β₂) sebesar 0,533. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel *e-SPT* (X₂) satu satuan nilai, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,533 satu satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol (0). Ini berarti dengan meningkatnya penggunaan aplikasi *e-SPT* oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

Sementara itu, variabel *e-filing* (X₃) memiliki nilai koefisien regresi (β₃) sebesar 0,430. Artinya, setiap peningkatan variabel *e-filing* (X₃) satu satuan nilai, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,430 satu satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol (0). Maksudnya, semakin tinggi penggunaan aplikasi *e-filing* maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

Pengaruh *e-Registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-Filing* (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Simultan

Setelah asumsi-asumsi klasik linear berganda diperiksa dan dipenuhi, maka berikutnya adalah pengujian pengaruh variabel *e-registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-filing* (X₃) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1=\beta_2=\beta_3=0$$

Artinya tidak ada pengaruh signifikan antara

e-registration (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Artinya terdapat pengaruh signifikan antara *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh ketiga variabel X tersebut secara simultan terhadap variabel Y adalah dengan melakukan pengujian pada koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi sebesar 0,508 (nilai *R Square* pada tabel *Model Summary*) berikut ini:

Tabel 2
Model Summary

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,713 ^a	,508	,493	1,43998	2,184

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Ini berarti secara simultan/bersama-sama variabel *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) memberikan pengaruh sebesar 50,8% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Angka 50,8% disini artinya setiap perubahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar 50,8% dipengaruhi oleh perubahan variabel *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing*. Adapun sisanya yaitu sebesar 0,492 atau 49,2% disebabkan oleh adanya faktor lain atau variabel-variabel lain diluar ketiga variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini seperti *e-Billing* dan *e-Payment* (Putra, Astuti dan Riyadi: 2015).

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh dari *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara keseluruhan, maka

dilakukan uji F dengan uji dua pihak dalam taraf nyata 1% (0,01). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tabel ANOVA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205,457	3	68,486	33,028	,000 ^b
	Residual	199,060	96	2,074		
	Total	404,517	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel ANOVA diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 33,028. Sedangkan nilai F_{tabel} pada taraf nyata (α) 1% dengan derajat bebas $V_1 = k$; $V_2 = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$ adalah 3,98. Nilai tersebut diperoleh dari tabel distribusi F. Kemudian nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} seperti berikut ini:

Tabel 4

Kesimpulan Pengujian Secara Simultan

Nilai F_{hitung}	Nilai F_{tabel}	Kesimpulan
33,028	3,98	Signifikan

Sumber: Data Penghitungan

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengaruh *e-Registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-Filing* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Parsial

Berikutnya adalah pengujian dari masing-masing variabel *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) terhadap kepatuhan

wajib pajak (Y). Apakah memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Berikut adalah hipotesisnya:

$H_0 : \beta_1 = 0$,
berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-registration* (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1 : \beta_1 \neq 0$,
berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-registration* (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_0 : \beta_2 = 0$,
berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-SPT* (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1 : \beta_2 \neq 0$,
berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-SPT* (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_0 : \beta_3 = 0$,
berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-filing* (X_3) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1 : \beta_3 \neq 0$,
berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-filing* (X_3) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Untuk mengetahui pengaruh langsung secara individual / parsial, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkah pengujiannya sama seperti uji F. Pertama, kita harus mencari nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel X. Setelah itu nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka hasil hipotesis tersebut adalah signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon. Sebaliknya, jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai

t_{tabel} maka hipotesis tidak signifikan, artinya pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlihat pada tabel *Coefficients* (tabel 5) diperoleh nilai t_{hitung} :

Tabel 5
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
		1	(Constant)	4,111	1,231				
	X1	,237	,089	,208	2,661	,009		,842	1,188
	X2	,533	,082	,477	6,467	,000		,942	1,061
	X3	,430	,102	,339	4,234	,000		,802	1,247

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 adalah 2,661, sedangkan variabel X_2 yaitu 6,467 dan X_3 sebesar 4,234. Sementara itu, nilai t_{tabel} yang diperoleh dari nilai distribusi *t-student* pada taraf nyata (α) 1% dengan derajat bebas 100 yaitu 2,626. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Kesimpulan Pengujian Secara Parsial

Variabel	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Kesimpulan
X_1	2,661	2,626	Signifikan
X_2	6,467	2,626	Signifikan
X_3	4,234	2,626	Signifikan

Sumber: Hasil Penghitungan

Dari tabel 6 diatas terlihat bahwa masing-masing variabel X_1 , X_2 dan X_3 memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3), maka akan langsung terjadi perubahan yang berarti pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Selain itu, pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian mengenai pengaruh *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. *e-Registration* berpengaruh sebesar 2,661 terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. *e-SPT* berpengaruh sebesar 6,467 terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. *e-Filing* berpengaruh sebesar 4,234 terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan dibawah ini:

1. Sebaiknya seluruh aplikasi perpajakan baik itu *e-registration* *e-SPT* dan *e-filing* digunakan oleh Wajib Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel *e-registration* paling rendah diantara variabel *e-SPT* dan *e-filing*.
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah referensi buku dan menggunakan variabel lain diluar variabel yang diteliti seperti *e-Billing* dan *e-Payment*. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan aplikasi tersebut baru diluncurkan oleh Dirjen Pajak setelah penelitian ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Arumsari, Dilla Lissa. Seksi Pelayanan KPP Pratama Cirebon, 10/11/2015.
 Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan (Konsep Teori dan Isu)*. Jakarta: Kencana.
 Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
 Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
 Prabowo, Syarif. Seksi Pelayanan *On Job Training* KPP Pratama Cirebon, 18/11/2015.
 Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
 Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Aini, Qurrotul. 2011. *Peran Sosialisasi e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Negeri Surabaya.
 Astuti, Inne Nidya. 2015. *Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. Universitas Negeri Surabaya.
 Handayani, Kadek Putri dan Ni Luh Supadmi. 2013. *Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*. Universitas Udayana.
 Hapsari, Dini Wahyu. 2014. *Analisis Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Telkom. Jurnal InFestasi Vol.10 No 1. Hal 36-48.
 Putra, Toma Yanuar, Endang Siti Astuti dan Riyadi. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-Spt, Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Brawijaya. Vol.6 No.1.
 Sari, Novi Purnama, Kertahadi dan Maria Goreti Wi Endang NP. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT*. Universitas Brawijaya.
 Sumarna, Teni Takariani. 2013. *Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap sistem e-Filing dan Implikasinya Terhadap Biaya Kepatuhan*. Universitas Komputer Indonesia.
 Syafariani, Fenny dan Ronauli Nadeak. 2012. *Pengaruh Kualitas Sistem e-Registration terhadap Kepuasan Pengguna dan*

Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi.
Universitas Komputer Indonesia.

Tresno, Indah Pahala dan Selvy Ayu Rizky.
2012. *Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi.* Universitas Negeri Jakarta.
Prosiding Simposium Nasional Perpajakan

Pengaruh Audit Fee dan Client Size terhadap Audit Delay dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit

Siti Kustinah

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Evi Lestari

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan disusun dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar Audit (SA) yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan.

Menurut Langgeng (2012) Sistem Pengendalian Mutu sesuai dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan standar yang berlaku di Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 sangat penting untuk menjamin mutu dan menjaga kualitas atas semua jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa Audit Fee dan Client Size berpengaruh terhadap Audit Delay; serta untuk membuktikan secara empiris bahwa Audit Fee, Client Size dan Audit Delay berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Audit Fee (X_1), Client Size (X_2), Audit Delay (Y), dan Kualitas Audit (Z). Populasi penelitian ini adalah seluruh Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung dengan teknik sampel menggunakan sampling jenuh.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Audit Fee berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay (2) Client Size berpengaruh positif signifikan terhadap Audit Delay (3) Audit Fee berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit (4) Client Size berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit (5) Audit Delay berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit.

Kata Kunci : *Audit Fee, Client Size, Audit Delay, Kualitas Audit.*

PENDAHULUAN

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2012:4). Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut disusun dengan berpedo-

man pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar Audit (SA) yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan. Secara khusus, Standar Audit (SA) menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut (SPAP : 2013).

Auditing merupakan kegiatan yang memakan waktu dan diperlukan ketelitian, sehingga kadang-kadang publikasi laporan keuangan tersebut menjadi tertunda. Penyusunan dokumentasi audit tepat pada waktunya, membantu meningkatkan mutu audit, dan memfasilitasi rewiu dan evaluasi bukti audit secara efektif dan memperlancar kesimpulan yang diambil sebelum laporan auditor difinalkan, karena relevansi/ nilai informasi keuangan cenderung menurun dengan lewatnya waktu (Tuanakotta, 2013: 489). Penelitian yang dilakukan oleh Mande, *et al* (2011) yang menyatakan bahwa investor harus mempertimbangkan *audit delay* karena menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas.

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Langgeng Subur (2012) menemukan bahwa banyak akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak melakukan inspeksi atas hasil pekerjaan auditornya. Menurut Langgeng, hal tersebut perlu diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sebab inspeksi bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur dalam pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif. Apalagi khususnya Kantor Akuntan Publik (KAP) perorangan dinilai lemah pada unsur yang lain, seperti promosi, konsultasi, supervisi, penerimaan dan keberlanjutan klien serta pengembangan profesional. Padahal, menjalankan Sistem Pengendalian Mutu sesuai dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan standar yang berlaku di Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 sangat penting untuk menjamin mutu dan menjaga kualitas atas semua jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Terkait dengan jaminan mutu dan kualitas, Menteri Keuangan Agus Martowardojo (2010) menyatakan pada krisis ekonomi 1997-1998, peran akuntan publik dianggap belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut karena banyak laporan keuangan perusahaan ternyata tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Peran akuntan publik dinilai tidak cukup baik, karena tidak bekerja secara profesional,

sehingga auditnya kurang berkualitas. Peran akuntan publik yang sempat dinilai kurang baik tersebut, ternyata ikut menyumbang perekonomian nasional meskipun dalam skala kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo (2013), bahwa akuntan berperan dalam perekonomian nasional dengan pendapatan per kapita Kantor Akuntan Publik (KAP) sebesar USD 4.167 ditahun 2011 meskipun terbilang masih kecil hanya 1,2 kali dari pendapatan per kapita nasional Indonesia sebesar USD 3.420. Kecilnya pendapatan Akuntan Publik (AP) tersebut berawal dari *audit fee* yang rendah. Hal tersebut menyebabkan ketidakmampuan Kantor Akuntan Publik (KAP) membayar karyawannya dengan gaji tinggi, sehingga kalah bersaing dalam menarik sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas.

Kendala kecilnya pendapatan yang diperoleh Kantor Akuntan Publik (KAP), menurut Anggota Dewan Pengurus IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) Setiawan Kriswanto (2013) karena dalam praktek di lapangan, besaran *audit fee* terhadap jasa Akuntan Publik (AP) sering kali terjadi tawar menawar antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan calon *auditee*-nya. Hal tersebut berakibat pada penurunan *audit fee* dan juga berdampak pada ruang lingkup audit. Setiawan mengakui pihak manajemen atau *auditee* terkadang melalaikan kewajibannya, dengan menunda pembayaran *audit fee* hingga satu tahun ke depan atau bahkan dibayar saat penunjukan tahun depannya. Padahal, pembayaran *fee* tepat waktu akan menjaga independensi Akuntan Publik (AP), sehingga auditnya menjadi berkualitas.

Kualitas audit juga tidak lepas dari kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut. Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie (2013) menyatakan, kemampuan Akuntan Publik lokal yang masih sering dibantu pihak afiliasi asing ketika menghadapi persoalan rumit saat mengaudit laporan keuangan, menimbulkan kesan kualitas Akuntan Publik (AP) lokal masih di bawah akuntan publik afiliasi asing. Mantan Ketua

Seksi Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia (SAP IAI) MP Sibarani (2013) mengakui kompetensi Akuntan Publik (AP) lokal belum secanggih akuntan publik afiliasi yang sudah lama berdiri, berpengalaman dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Dalam praktiknya terdapat beberapa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dikenai sanksi berupa pembekuan izin. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Ngalim Sawega (2012) menyampaikan, sepanjang tahun 2012 terdapat 4 akuntan publik (AP) yang berpraktek di sektor pasar modal dicabut kegiatan usahanya, 65 akuntan publik (AP) dikenakan sanksi ringan berupa denda dan satu akuntan publik (AP) dikenakan sanksi peringatan tertulis. Sanksi terhadap akuntan publik (AP) yang melanggar ketentuan di pasar modal mulai dari berupa denda, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Sukrisno Agoes (2012 : 9) besaran *audit fee* termasuk ke dalam salah satu tahapan-tahapan audit pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan yaitu: Kantor Akuntan Publik mengajukan surat penawaran (*audit proposal*) yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (*audit fee*), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain.

Besaran *Audit Fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Sukrisno Agoes, 2012 : 46). Berdasarkan diskusi tentang operasi dan perencanaan audit, perkiraan *audit fee* dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang ditugaskan dan bervariasi sesuai dengan tingkatan tanggung jawab yang dipikul dan pengalaman serta keahlian yang diperlukan. (Marisi P. Purba, 2012 : 54) Imbalan jasa

audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan, tingkat pendidikan dan pengalaman personel yang melakukan pekerjaan tersebut, tingkat tanggungjawab yang terkandung dalam pekerjaan tersebut, dan waktu yang dibutuhkan oleh semua personel yang mengerjakan pekerjaan tersebut. (Randal, *et al*, 2011:80)

Menurut Sa'adah (2013) *Client Size* diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dalam Sukrisno Agoes (2012 : 44) mendefinisikan Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota Ikatan Akuntan Indonesia-Kantor Akuntan Publik (IAI-KAP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa professional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.

Untuk tujuan penentuan penggunaan pertimbangan dalam audit atas entitas yang lebih kecil, suatu entitas yang lebih kecil mengacu pada suatu entitas yang pada umumnya memiliki karakteristik kualitatif (SPAP, 2013:SA,200.34) seperti dibawah ini:

- (a) Konsentrasi kepemilikan dan manajemen terpusat pada sejumlah kecil individu (sering seorang individu: baik individu dalam pengertian sebenarnya atau suatu perusahaan yang memiliki entitas yang lebih kecil tersebut, sepanjang pemilikinya menunjukkan karakteristik kualitatif yang relevan); dan
- (b) Memiliki satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:
 - (i) Transaksi sederhana atau tidak rumit;
 - (ii) Penyelenggaraan catatan yang sederhana;
 - (iii) Sedikit lini bisnis dan sedikit produk dalam lini bisnis tersebut;

- (iv) Sedikit pengendalian intern;
- (v) Sedikit tingkatan manajemen dengan tanggung jawab pengendalian yang luas; atau
- (vi) Sedikit personel, yang pada umumnya masing-masing memiliki tugas yang luas.

Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statements*-nya ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) paling lambat 90 hari setelah tahun buku (Sukrisno Agoes, 2012 : 10). *Audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. (Rachmawati : 2008)

Menurut Konrath (2002 : 5) dalam Sukrisno Agoes (2012:2) mendefinisikan *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sukrisno Agoes (2012:4) menyatakan *Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Auditing menurut Mulyadi (2008 : 9) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegia-

tan ekonomi, dengan tujuan untuk menerapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

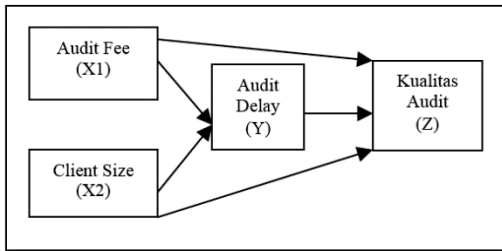
Auditing menurut Randal, *et al* (2011 : 4) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kualitas audit (*audit quality*) didefinisikan sebagai probabilitas bahwa laporan keuangan tidak memuat penghilangan ataupun kesalahan penyajian yang material. Sehingga auditor diharapkan dapat mendeteksi dan memperbaiki atau mengungkapkan penghilangan atau kesalahan saji informasi keuangan yang material, ketika auditor gagal untuk memenuhi ekspektasi ini, maka kegagalan audit adalah hasil yang tidak dapat dielakan, maka kemudian tingkat kualitas audit lah yang dapat menghindarkan terjadinya kegagalan audit. (Belkaoui, 2011 : 85)

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan identifikasi masalah maka, dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H₁ : Terdapat pengaruh positif signifikan *Audit Fee* terhadap *Audit Delay*
- H₂ : Terdapat pengaruh positif signifikan *Client Size* terhadap *Audit Delay*
- H₃ : Terdapat pengaruh positif signifikan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit
- H₄ : Terdapat pengaruh positif signifikan *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit
- H₅ : Terdapat pengaruh positif signifikan *Client Size* terhadap Kualitas Audit
- H₆ : Terdapat pengaruh positif signifikan *Audit Fee* dan *Client Size* terhadap *Audit Delay* dan implikasinya terhadap Kualitas Audit.

Model penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian
sumber : Model Peneliti

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif Sugiyono (2013 : 2). Menurut Sugiyono (2013:13) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah *nonprobability sampling*, di mana sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Variabel *Audit Fee* dan *Client Size* dengan masing-masing dengan 3 indikator dan 4 indikator, *Audit Delay* dan Kualitas Audit diukur dengan 2 indikator dan 6 indikator.

Analisis data dilakukan dengan *multiple regression*. Untuk mempermudah, operasi penghitungan dilakukan dengan bantuan Software SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Fee*, *Client Size*, *Audit Delay* secara simultan terhadap Kualitas Audit

dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,327 seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.572 ^a	.327	.171	3.61866	2.182

a. Predictors: (Constant), Y, X2, X1

b. Dependent Variable: Z

variabel *Audit Fee* (X_1), *Client Size* (X_2), *Audit Delay* (Y) hanya memberikan pengaruh sebesar 32,7% terhadap Kualitas Audit. Angka 32,7% disini artinya setiap penambahan 32,7 satuan *Audit Fee*, *Client Size*, *Audit Delay* maka akan mengakibatkan penambahan Kualitas Audit sebesar 32,7 satuan. Adapun sebesar 67,3% sisanya disebabkan oleh variabel – variabel lain diluar ketiga variabel tersebut yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Pengujian signifikansi pengaruh simultan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Pengujian Signifikansi Pengaruh Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	82.583	3	27.528	2.102	.149 ^a
	Residual	170.231	13	13.095		
	Total	252.814	16			

a. Predictors: (Constant), Y, X2, X1

b. Dependent Variable: Z

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa secara simultan *Audit Fee*, *Client Size*, *Audit Delay* berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat diketahui dari nilai F hitung sebesar 2,102 yang lebih kecil dari F tabel.

Selanjutnya dilakukan analisis pengaruh parsial. Untuk melihat pengaruh secara parsial dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3.
Pengaruh Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	4.055	4.611		.879	.395		
X1	.381	.750	.198	.508	.620	.342	2.924
X2	.540	.549	.300	.985	.343	.558	1.792
Y	.727	1.193	.260	.609	.553	.283	3.531

a. Dependent Variable: Z

Dari tabel diatas, dapat diketahui Variabel *Audit Fee* (X_1) memiliki nilai koefisiensi regresi (β_i) sebesar 0,381 *Client Size* (X_2) memiliki nilai koefisiensi regresi (β_i) sebesar 0,540 dan *Audit Delay* (Y) memiliki nilai koefisiensi regresi (β_i) sebesar 0,727

Untuk menguji signifikansi pengaruh tersebut, selanjutnya dilakukan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4.
Uji Signifikansi Pengaruh Parsial

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Kesimpulan
X1	0.508	2.145	Tidak Signifikan
X2	0.985	2.145	Tidak Signifikan
Y	0.609	2.145	Tidak Signifikan

sumber : DataO Olahan

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai t hitung untuk variabel *Audit Fee* adalah sebesar 0,508. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,145. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel *audit Fee* dengan Kualitas Audit. Hal ini diperkuat juga oleh nilai signifikansi dari variabel *Audit Fee* sebesar 0,620 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yakni 0,05.

Variabel *Audit Fee* (X_1) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. Artinya semakin rendah atau tinggi penerimaan *Audit Fee* maka akan

mempengaruhi secara tidak signifikan terhadap Kualitas Audit.

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Client Size* adalah sebesar 0,985. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,145. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel *Client Size* dengan Kualitas Audit. Hal ini diperkuat juga oleh nilai signifikansi dari variabel *Client Size* sebesar 0,343 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yakni 0,05.

Variabel *Client Size* (X_2) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. Artinya semakin kecil atau besar *Client Size* maka akan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Audit, selain itu nilai yang didapat dari sampel yang diambil ini, tidak menggambarkan jawaban populasi (Kantor Akuntan Publik di Indonesia) atau dengan kata lain tidak dapat digeneralisasikan.

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Audit Delay* adalah sebesar 0,609. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,145. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel *Audit Delay* dengan Kualitas Audit tidak signifikan. Hal ini diperkuat juga oleh nilai signifikansi dari variabel *Audit Delay* sebesar 0,553 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yakni 0,05.

Variabel ini memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap Kualitas Audit dan pengaruh tersebut baru sebatas sampel yang ada, belum dapat digeneralisasikan, dengan kata lain tidak memiliki pengaruh signifikan.

KESIMPULAN

Pada umumnya *Audit Fee* yang diterima, *Client Size* dan *Audit Delay* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung dapat dikatakan baik, dan dapat dikatakan pula memberikan pengaruh positif memberikan pengaruh tetapi tidak berarti pada Kualitas Audit ditengah gencarnya persaingan antar Kantor Akuntan Publik di Indonesia.

Secara parsial *Audit Fee* terbukti

mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. Artinya semakin rendah atau tinggi penerimaan Audit Fee maka akan mempengaruhi secara tidak signifikan terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan, jawaban sampel yang didapat tidak mewakili populasi dengan kata lain tidak dapat digeneralisasikan.

Client Size terbukti mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. Artinya semakin kecil atau besar *Client Size* maka akan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Audit, selain itu nilai yang didapat dari sampel yang diambil ini, tidak menggambarkan jawaban populasi (Kantor Akuntan Publik di Indonesia) atau dengan kata lain tidak dapat digeneralisasikan.

Secara parsial menyatakan bahwa *Audit Delay* terbukti mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Audit, jawaban sampel yang didapat belum mewakili populasi dengan kata lain belum dapat digeneralisasikan.

Melihat hasil pembahasan yang tergambar pada implikasi penelitian pada bab sebelumnya, terdapat 3 indikator yang berada dalam kategori cukup baik yakni indikator Kompleksitas jasa dalam variabel *Audit Fee* dan indikator Transaksi dan pembukuan *Client* pada variabel *Client Size*, dan indikator Ketepatan Waktu pada variabel *Audit Delay*. Dan secara keseluruhan variabel *Audit Fee* berada dalam kategori cukup baik. Sedangkan indikator lainnya baik itu dalam variabel *Audit Fee* maupun variabel *Client Size*, dan variabel *Audit Delay* berada dalam kategori baik, artinya indikator ini dianggap baik pelaksanaannya dan memiliki pengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

Untuk variabel-variabel dengan indikator yang memiliki kategori baik, diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pelaksanaannya oleh Kantor Akuntan Publik. Terlebih pada tiga indikator yang berada dalam kategori cukup baik, harus benar-benar mendapat perhatian guna terus ditingkatkan oleh Kantor Akuntan Publik. Hal ini dilakukan agar Kualitas Audit dapat terus

dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu ditengah persaingan antar Kantor Akuntan Publik yang sangat ketat baik itu dalam negeri maupun afiliasi.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan faktor-faktor lain sebagai variabel bebas yang akan mempengaruhi Kualitas Audit. Selain itu pemilihan responden diharapkan dapat lebih baik / sesuai dengan variabel apa yang akan diteliti agar hasil yang didapatkan akan lebih baik / sesuai dengan apa yang hendak diukur dan diketahui.

Selain menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya bagi rekan-rekan lain yang ingin menelaah lebih jauh mengenai Audit Fee, *Client Size*, *Audit Delay* dan pengaruhnya terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan banyak sekali fakta yang menunjukkan bagaimana antara teori dengan aplikasinya dilapangan. Keberadaan teori sering kali menjadikan kita terpaku pada sebuah pernyataan sehingga membuat kita tidak mampu menganalisa faktor-faktor lain yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu disarankan bagi para pembaca pada umumnya dapat melihat hasil penelitian ini dengan berbagai macam sudut pandang, sehingga point-point yang dianggap tidak sesuai dengan teori dapat terjawab berdasarkan pelaksanaan yang ada di lapangan. Karena tidak selamanya pelaksanaan teori akan berjalan sama di Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan penelitian terlihat banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit mulai dari *time budget pressure*, *audit tenure*, ukuran Kantor Akuntan Publik atau etika profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Agus Martowardojo. 2010. Menkeu: RUU Akuntan Publik Cegah Laporan Bodong. Jakarta: Penerbit Media Republika.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Accounting Theory*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. *Standar Audit (SA 200)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kwik Kian gie dan MP Sibarani. 2013. KAP Harus Kembangkan Kapasitas SDM-nya. Jakarta: Penerbit media Akuntan Online.
- Langgeng Subur. 2012. Banyak KAP Perseorangan tidak Melakukan Inspeksi pada Auditornya. Jakarta: Media Akuntan Online.
- Ngalim Sawega. 2013. Dicabut 4 Izin Praktek AP di Pasar Modal. Jakarta: Penerbit media Akuntan Online.
- Purba, Marisi P. 2012. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia: Suatu Pembahasan Kritis terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens, Amir Abadi Jusuf. 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan Kriswanto. 2013. Fee Audit AP seperti Menawar Cabe. Jakarta: Penerbit Media Akuntan Online.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tarko Sunaryo. 2013. Tarko: AP Perlu Menaikan Fee Audit. Jakarta: Penerbit Akuntan Online.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Mudrabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2012)

Ageng Saepudin Kanda

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Dian Anita

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Dini Astrilia Rachman

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Non Performing Financing (NPF), dan seberapa besar pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Non Performing Financing (NPF) tahun 2011-2012 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini merujuk pada fenomena yang terjadi tahun 2011 dan 2012 dimana penyaluran dana (pembiayaan) meningkat dari 3,01% menjadi 3,53% dan NPF menurun dari 2,52% menjadi 2,22%.

Mudharabah menurut PSAK 105 adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik yang digunakan adalah statistik inferensial. Sampel penelitian diambil 7 Bank Umum Syariah dari jumlah keseluruhan 11 Bank Umum Syariah. Metode statistik untuk pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dan pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yang didapat dari analisis regresi berganda, dengan menggunakan alat bantu SPSS 16.00 for windows.

Dari hasil perhitungan uji statistik bahwa secara simultan pembiayaan yang diukur dengan Mudharabah dan Murabahah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) sebesar 24,1% sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara parsial Mudharabah tidak memiliki pengaruh, Murabahah juga tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF).

Kata Kunci : *Pembiayaan Mudharabah, Mudrabahah, Non Performing Loan (NPL).*

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial*

Intermediary). Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan : "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalur-

kannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Menurut Kasmir (2010 : 11) bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.

Berawal dari krisis moneter yang terjadi sekitar pertengahan 1997 yang berimbas pada sektor perbankan. Pada saat itu perbankan mengalami kondisi yang memprihatinkan ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank karena memiliki CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang jauh berada dibawah 8%, sebagai batas kewajaran rasio kecukupan modal berdasarkan BIS (*Banks for International Settlement*).

Ketika perbankan nasional mengalami krisis yang cukup parah pada tahun 1998, masih terdapat bank yang bertahan dalam krisis yaitu bank syariah (Bank Muammalat Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1992. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muammalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Antonio, 2011 : 26). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Pada Desember tahun 2003 terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total asset lebih dari 7,8 triliun rupiah tanpa partisipasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Bank Indonesia : 2004). Sedangkan pada Desember tahun 2011 di Indonesia terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total asset lebih dari 145 triliun rupiah (Bank Indonesia:2011). Sesungguhnya perbankan syariah nasional tumbuh

pesat dalam lima tahun terakhir. Pada 2007 asetnya baru mencapai Rp 35,5 triliun dan pada akhir 2011 sudah mencapai Rp 145 triliun, melejit hampir empat kali lipat dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, pangsa pasar (market share) perbankan syariah baru 4,57% dari total aset perbankan nasional pada akhir tahun 2012.

Pembiayaan merupakan bagian yang memiliki andil tingginya tingkat penyaluran dana bank syariah. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah selalu menunjukkan kinerja positif, dapat dilihat dari penghimpunan dana yang selalu meningkat setiap tahunnya dan meningkat sangat pesat di tahun 2009 dengan pertumbuhan sebesar 41,84%. Demikian pula halnya dengan pembiayaan yang tumbuh 22,76%. Meskipun pertumbuhan bisnis perbankan syariah meningkat, tingkat ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas selalu mengalami fluktuasi.

Pembiayaan tersebut menghasilkan revenue bagi hasil untuk nasabah dan juga bagi bank yang nantinya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Namun pembiayaan yang besar tentunya memiliki risiko NPF yang tinggi pula. Pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah mengalami peningkatan cukup berarti dalam dua tahun terakhir. Pada akhir 2005 gross NPF (*Non Performing Financing*) baru sekitar 2,82%, namun pada akhir 2006 meningkat tajam menjadi 4,75%, dan hingga akhir triwulan III-2007 berada pada posisi 6,63%. Peningkatan pembiayaan bermasalah pada industri perbankan syariah terjadi karena berbagai faktor, baik dari internal bank, internal nasabah, ataupun masalah eksternal.

Maksud penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2012.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011 –2012, (2) Mengetahui kondisi *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011 – 2012, (3) Mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan terhadap *Non Performing*

Financing (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011 – 2012.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pembiayaan

Menurut Karim dalam Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai Veithzal, 2008).

Pembiayaan Murabahah

Al Murabahah / BBA (Bai' Bitsamal Aji) adalah pembiayaan untuk jual beli barang investasi atau bahan baku dimodal kerja (merupakan konsep penyederhanaan instrumen bagi hasil ke jual beli dengan risiko penangguhan pembayaran dan fluktuasi harga).

Al Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*lump sum deferred payment*).

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas

akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).

Landasan syari'ah *murabahah* selain QS. *Al-Baqarah* ayat 275 dan QS. *An-Nissa'* ayat 29 juga terdapat hadist yang menerangkan tentang *murabahah*. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. *al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban*)

Sedangkan menurut PSAK 102 *Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-mal* dan keahlian dari *mudharib*.

Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni: $\frac{3}{4}$ Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) $\frac{3}{4}$ Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

QS. Al-Muzzammil ayat 20 "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."

Hadist dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

Sedangkan menurut PSAK 105 *Mudharabah* yaitu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Kualitas Pembiayaan dan NPL (Non Performing Loan) / NPF (Non Performing Financing)

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Menurut Selamat Riyadi (2006 : 160) NPL *gross* adalah Perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.

Non performing loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pendapatan terbesar suatu bank berasal dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikan masyarakat dan sumber dana terbesar suatu bank juga berasal dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga aktivitas penghimpunan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit merupakan aktivitas atau fungsi utama suatu bank. Kredit yang diberikan ke masyarakat bukannya tidak berisiko gagal atau macet. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. (Sumber :

<http://jhthamrin.blogspot.com/2009/04/non-performing-loan.html>)

$$\frac{NPL}{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Yang termasuk kredit bermasalah adalah kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

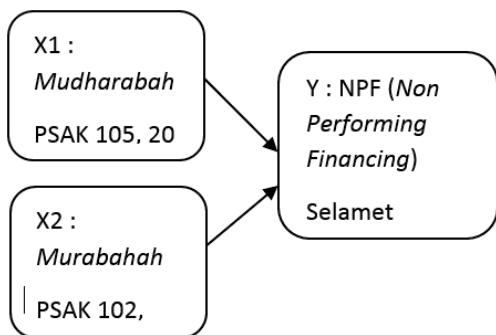
KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Akad-akad yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada bank syariah adalah: 1) Pembiayaan *Murabahah*, 2) Pembiayaan *Salam*, 3) Pembiayaan *Istishna’*, 4) Pembiayaan *Ijarah* 5) Pembiayaan *Musarakah*, dan 6) Pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008) kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu: 1) Pembiayaan Lancar, 2) Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus, 3) Pembiayaan Kurang Lancar, 4) Pembiayaan Diragukan, dan 5) Pembiayaan Macet. Kualitas pembiayaan pada bank syariah dapat dilihat dari NPF bank syariah tersebut.

NPF merupakan rasio antara pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan. Semakin besar NPF bank syariah maka semakin rendah kualitas pembiayaan bank syariah tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka gambaran paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1
Model Penelitian
sumber : Model Peneliti

HIPOTESIS

Hipotesis yang ditetapkan berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas, sebagai berikut:

- H₀ : Mudharabah dan Murabahah berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap Non Performing Financing (NPF)
- H₁ : Mudharabah dan Murabahah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Non Performing Financing (NPF)
- H₀ : Mudharabah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)
- H₁ : Mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)
- H₀ : Murabahah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)
- H₁ : Murabahah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kinerja keuangan dalam hal kredit macet (*Non Performing Financing*) perbankan syariah berdasarkan aspek pembiayaan yang diukur dengan pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2008-2012.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang / kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Sugiyono (2008 : 120-121). Teknik sampel *Nonprobability Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2008:122).

Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive atas dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia sebelum tahun 2011.
- 2) Data yang dibutuhkan dalam proses penelitian lengkap yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan (Annual Report) tahun 2011 – 2012.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia yang dijadikan sampel sebanyak 8 bank.

Penelitian ini menggunakan metode atau teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji pengaruh *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap NPF maka digunakan analisis regresi berganda. Dengan menggunakan SPSS 16.0 persamaan regresi dapat dilihat dari tabel koefisien berikut :

Tabel 1
Coefficient

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-0.008	0.021		-0.397	0.699		
Mudharabah	0.03	0.088	0.105	0.343	0.738	0.728	1.373
Murabahah	0.05	0.029	0.538	1.748	0.109	0.728	1.373

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai β_0 (*intersep*/konstanta) adalah - **0.008** sedangkan nilai dari β_1 (*slope*) untuk *Mudharabah* (X_1)= 0,030 dan *Murabahah* (X_2)= 0,050. Dari hasil pengolahan data

penelitian diperoleh persamaan dari regresi linearnya berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = - 0.008 + 0.030X_1 + 0.050X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta sebesar - **0.008** menyatakan bahwa ketika variabel bebas *Mudharabah* dan *Murabahah* sama dengan nol, maka NPF sebesar - **0.008**.
2. Nilai *Mudharabah* (X_1) memiliki koefisien regresi berganda sebesar **0.030** artinya apabila nilai variabel lainnya tetap (tidak berubah) atau sama dengan nol, maka kenaikan variabel *Mudharabah* (X_1) sebesar satu persen akan meningkatkan NPF sebesar **0.030** persen.
3. Nilai *Murabahah* (X_2) memiliki koefisien regresi berganda sebesar **0.050** artinya apabila nilai variabel lainnya tetap (tidak berubah) atau sama dengan nol, maka kenaikan variabel *Mudharabah* (X_1) sebesar satu persen akan menaikkan NPF sebesar **0.050** persen.

Pengaruh Mudharabah (X_1) dan Murabahah (X_2) terhadap Non Performing Financing (Y) secara simultan

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk menelusuri apakah *Mudharabah* dan *Murabahah* secara bersama – sama berpengaruh terhadap NPF, dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat signifikansi (α) = 5%. Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2
ANOVA

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0	2	0	1.746	.220 ^b
Residual	0.001	11	0		
Total	0.002	13			

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: NPF

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19, maka diketahui bahwa F_{hitung} sebesar **1,746**. Sedangkan F_{tabel} sebesar **3.98**

diambil dari tabel distribusi F (*F-Snedecor*) dengan df (*degree of freedom*) adalah 11 ($n-k-1/14-2-1$) pada derajat kesalahannya (α) 5% dengan n untuk jumlah variabel bebasnya adalah 2. Dari hasil pengolahan dan tabel maka didapat nilai untuk F dan pengujian statistiknya sebagai berikut :

Tabel 3
Pengujian Statistik untuk Uji F

Nilai F_{hitung}	Nilai F_{tabel}	Kesimpulan
1,746	3,98	H_0 diterima

sumber: Data Olahan

Pengujian statistik menunjukkan bahwa bahwa F_{hitung} (1.746) < F_{tabel} (3.98), (nilai F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel}) maka kesimpulan dalam pengujian statistiknya adalah menolak H_1 dan **menerima H_0** . Selain itu juga dapat dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi dimana probabilitas sebesar 0.220 nilainya lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0.05 ($0.220 > 0,05$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% *Mudharabah* dan *Murabahah* secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Pengaruh Mudharabah (X_1) dan Murabahah (X_2) terhadap Non Performing Financing (Y) secara parsial

Untuk menguji hal tersebut digunakan uji t dengan tingkat signifikansi (α) = 5%. Dari hasil perhitungan yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel *coefficients* maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4
Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-0.008	0.021		-0.397	0.699		
Mudharabah	0.03	0.088	0.105	0.343	0.738	0.728	1.373
Murabahah	0.05	0.029	0.538	1.746	0.109	0.728	1.373

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (0,343) < t_{tabel} (1,796) dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak atau dapat dilihat dari signifikansi *Mudharabah* sebesar 0,738 yang dapat dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05 dinyatakan lebih besar. Artinya berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat derajat kepercayaan sebesar 95% secara parsial *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh negatif terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (1,746) < t_{tabel} (1,796) dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak atau dapat dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi dimana H_0 diterima karena probabilitas 0,109 > 0,05. Artinya berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat derajat kepercayaan sebesar 95% secara parsial *Murabahah* tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang dapat dilihat dari tabel 4.6. Koefisien korelasi simultan (R) sebesar 0.491 yang berada antara 0,40-0,599 artinya secara simultan *Mudharabah* dan *Murabahah* memiliki hubungan yang sedang terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Sedangkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*R Square*) sebesar 0.241 artinya NPF periode tahun 2011-2012 dipengaruhi oleh *Mudharabah* dan *Murabahah* sebesar 24,1% sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, maupun pembiayaan *musyarakah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan yang diukur dengan rasio *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2011-2012. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap NPF, dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,738. Variabel Murabahah secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF, dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,109. Dapat disimpulkan secara parsial variable-variable independent yakni Mudharabah dan Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependent NPF.
2. Secara simultan semua variabel independent yakni Mudharabah dan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,220. Hasil estimasi dari persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependent yakni NPF dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent yakni Mudharabah dan Murabahah sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

Adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI), dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa Mudharabah dan Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap NPF (Non Performing Financing), walau demikian tetap untuk beberapa Bank Umum Syariah (BUS) ada pengaruhnya terhadap NPF (Non Performing Financing). Maka dari itu, perlu dilakukan adanya solusi untuk mencegah terjadinya NPF yang meningkat karena pembiayaan yang meningkat pula seperti restrukturisasi untuk nasabah yang macet agar tidak masuk kategori NPF (Non Performing Financing).
2. Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambahkan variabel selain variabel yang diteliti karena penelitian

ini terbatas pembiayaan yang diukur oleh 2 rasio yaitu Mudharabah dan Murabahah yang terbatas pada tahun 2011-2012 sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang digunakan nasabah sebagai bahan yang akan mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) misalnya besarnya pembiayaan lainnya seperti pembiayaan salam, pembiayaan istishna', pembiayaan ijarah, maupun pembiayaan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Dendawijaya, L. (2009), *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jogiyanto (2008), *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Kasmir (2008), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2010), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2010), *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (2005), *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Priyatno, D. (2009), *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta : Andi.
- Riyadi, S. (2006), *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta : FE UI.
- Rivai, V. & Veithzal, A.P. (2006), *Credit Management Handbook*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Santosa, P.B. & Ashari (2005), *Analisis statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Santoso, S. (2010), *Mastering SPSS 18*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono (2008), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Widarjono, A. (2007), *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonesia FE UII.

Jurnal dan Skripsi

- Luciana dan Winny. (2005), *Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. STIE PERBANAS Surabaya.
- Triatonifah, R. (2010), *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perbankan*. Skripsi. FE Unikom.
- Susi dan Asep, (2012), *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, *Banking and Management Review*. STIE EKUITAS.
- Febianto, Irawan (2007), *Risk Management in Mudharabah and Musharakah Financing of Islamic Bank*, *Banking & Financial Institutions eJournal*, Vol 2 Issue 155.

Peraturan

- PSAK no.1 (Revisi 2009)
- PSAK no. 102 (Murabahah)
- PSAK no. 105 (Mudharabah)
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

Situs Internet

- <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Perbankan/> Diunduh pada tanggal 30 November 2013.
- <http://jh-thamrin.blogspot.com/2009/04/non-performing-loan.html> Diunduh pada tanggal 30 November 2013

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL

Penulisan artikel yang dikirim ke redaksi STAR harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tulisan adalah hasil karya asli penulis yang belum pernah dipublikasikan pada media lain.
2. Sistematika penulisan
 - a. Abstrak, bagian ini memuat ringkasan penelitian, yang meliputi : masalah penelitian, tujuan, metode, temuan, dan kontribusi hasil penelitian. Abstrak ditulis di awal tulisan yang terdiri dari 100-250 kata. Dapat disajikan dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Abstrak diikuti dengan kata kunci (*keyword*) sesuai dengan variabel penelitian untuk memudahkan penyusunan indeks artikel (ditulis dalam bentuk *italic* dengan ukuran 10)
 - b. Pendahuluan, memaparkan latar belakang, dan tujuan penelitian.
 - c. Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian pustaka berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan hipotesis dan model penelitian.
 - d. Metode penelitian, menguraikan objek yang diteliti dan metode penelitian yang memuat desain penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik penarikan sampel, dan pengujian hipotesis.
 - e. Hasil penelitian dan pembahasan, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.
 - f. Kesimpulan dan saran, menguraikan kesimpulan penelitian dan saran yang berisi solusi dari temuan, kelemahan, dan keterbatasan penelitian.
3. Format Penulisan
 - a. Tulisan diketik dengan jarak baris satu spasi pada kertas berukuran B5 (18,2 cm x 25,7 cm) dengan margin atas dan bawah 2 cm, margin kiri dan kanan 1,5 cm. Tulisan diketik dengan huruf Cambria.
 - b. Kutipan langsung yang panjangnya (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak satu baris dengan *indented style* (bentuk berinden). Kutipan bahasa asing ditulis dengan *italic style* (bentuk miring).
 - c. Angka, lafalkan angka dari satu sampai dengan sepuluh, kecuali jika digunakan dalam tabel atau daftar dan ketika digunakan dalam unit atau kuantitas matematis, statistik, keilmuan atau teknis seperti jarak, bobot, dan ukuran. Misalnya *dua hari, 8 centimeter, 45 tahun*. Semua angka lainnya disajikan secara numerik. Umumnya kalau dalam perkiraan, angka dilafalkan; Misalnya : *kira-kira sepuluh tahun*.
 - d. *Persentase dan Pemecahan Desimal*, untuk penggunaan yang bukan teknis gunakan kata *persen* dan teks; untuk penggunaan teknis gunakan %.
 - e. Panjang tulisan tidak lebih dari 10.000 kata (dengan jenis font Cambria ukuran 10) atau maksimal 20 halaman.
 - f. Semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman.
 - g. Tabel, gambar, instrument penelitian sebaiknya dapat disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di bagian akhir naskah dalam bentuk lampiran). Penulis cukup menyebutkan pada bagian didalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar.
 - h. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, dan sumber kutipan.
 - i. Daftar pustaka, memuat, sumber – sumber atau literatur yang dikutip dalam penulisan artikel. Hanya sumber yang diacu yang dimuat di daftar referensi.
4. Dokumentasi
 - a. *Acuan*, karya yang diacu harus menggunakan “sistem penulisan tahun” yang mengacu pada karya pada daftar acuan. Penulis harus berupaya untuk mencantumkan halaman karya yang diacu.
 - a. Dalam teks, karya diacu dengan cara berikut : nama akhir/keluarga penulis dan tahun dalam

- tanda kurung; contoh: (Jogiyanto, 2000), dua penulis (Jogiyanto dan Hartono, 2002), lebih dari dua penulis (Jogiyanto et al., 2002) lebih dari dua sumber diacu bersamaan (Jogiyanto, 2002; Ciptono, 2004), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Jogiyanto, 2000 : 121).
- b. Kecuali bisa menimbulkan kerancuan, jangan gunakan *H*, "hal", atau "*halaman*" sebelum nomor halaman tetapi gunakan tanda titik dua; contoh: (Jogiyanto, 1991a) atau (Jogiyanto, 1991a; Hartono 1992b).
 - c. Jika nama penulis disebutkan dalam teks, tidak perlu diulang dalam acuan, contoh: "Jogiyanto (1991:121) mengatakan....."
 - d. Acuan ke tulisan yang merupakan karya institusional sedapat mungkin harus menggunakan akronim atau sesingkat sependek mungkin; contoh: (Komite SAK-IAI, PSAK28, 1997).
5. Format Daftar Pustaka
- Daftar pustaka ditulis alfabatis sesuai dengan nama akhir/keluarga (tanpa gelar akademik), baik untuk penulis asing maupun penulis Indonesia.
1. Satu pengarang
 - Brigham, Eugene F. (1992). *Fundamental of Financial Management*. Sixth edition. Fort Worth: The Dryden Press.
 2. Dua pengarang
 - Wolk, Harry L. and Tearney, Michael G. (1997). *Accounting Theory: A conceptual and Institutional Approach*. South Western College Publishing: Cincinnati, Ohio.
 3. Referensi dari majalah/jurnal
 - a. Swagler, Roger. (1994). "Evolution and Applications of the Term Consumerism: Theme and Variation". *The Journal of Consumer Affairs*. February : 347-360.
 - b. Williamson, Lousie A. (1997). "The Implications of Electronic Evidence". *Journal of accountancy*. February : 69-71.
 - c. Baxter W. T. (1996). "Future Events – A Conceptual Study of Their Significance for Recognition and Measurement A Review Article". *Accounting and Business Research*. Vol. 26, No. 2.
 4. Referensi dari institusi
 - Ikatan Akuntan Indonesia (1994). "Standar Profesional Akuntan Publik". Bagian Penerbitan STIE YKPN: Yogyakarta.
 5. Referensi dari makalah seminar
 - Kadir, Sjamsir (1996). "Mentalitas dan etos kerja sumber daya manusia". *Makalah seminar nasional strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam era globalisasi* : Yogyakarta: 16-17 Januari.
 6. Referensi kolektif
 - Backhard, Richard (1989). "What is Organization Development?", dalam: *Organization Development: Theory, Prentice and Research*. Wendel L. French, Cecil H. Bell, Jr. and Robert A. Zawacki (ed). Homewood, III: Richard D. Irwin.
 7. Referensi Elektronik
 - a. Boon, J. (tanpa bulan). *Anthropology of regional*. Melalui <http://www.indiana.edu/~wanthro/religion.htm> {10/5/03}.
 - b. Kawasaki, Jodee L., and Matt R. Raveb. 1995. "Computer administreted Surveys in Extension". *Journal of Extension* 33 (june). E-Journal on-line. Melalui <http://www.joe.org/june33/95.htm> {06/17/00}.

ISSN 1693-4482



1693-4482